

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka pendek hingga jangka panjang. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 sebagai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi Walikota Singkawang. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Pada Tahun 2020 dilakukan Revisi pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yaitu Revisi tentang Klasifikasi, Kode Rekening,



Nomenklatur serta perubahan target sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Lembaran Negara RI th 2015 no. 3;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
29. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 ((Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1); dan
31. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang ((Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
32. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2018 -2022 ini dilakukan karena adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Rekening dan Nomenklatur yang harus dipedomani dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang ke-PUan dan penataan ruang sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang



- dalam menyusun program dan kegiatan periode 2018-2022 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang 5 (lima) tahun kedepan;
 3. Menterjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang kedalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang tahun 2018-2022, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
 4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan perubahan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2022;
 5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang periode 2018-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang 2018-2022 ini terbagi menjadi delapan bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup baik spasial dan substansi, metodologi, dasar hukum, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, gambaran mengenai sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.



- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- Bab III berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diikuti dengan telaah visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaah renstra K/L dan RPJMD Kota Singkawang, telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.
- Penentuan isu-isu strategis mencakup bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang yang merupakan hasil dari serial Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan baik oleh internal Dinas Pekerjaan Umum atau pun diskusi eksternal dengan Perangkat Daerah terkait.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- Bab IV berisi tentang visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, serta strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang pada periode 2018-2022.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Bab V berisi tentang strategi dan arah kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- Bab VI berisi tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi tentang perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Perangkat Daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII memuat kaidah pelaksanaan rencanas strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DISPUPR) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang. Fungsi DISPUPR adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

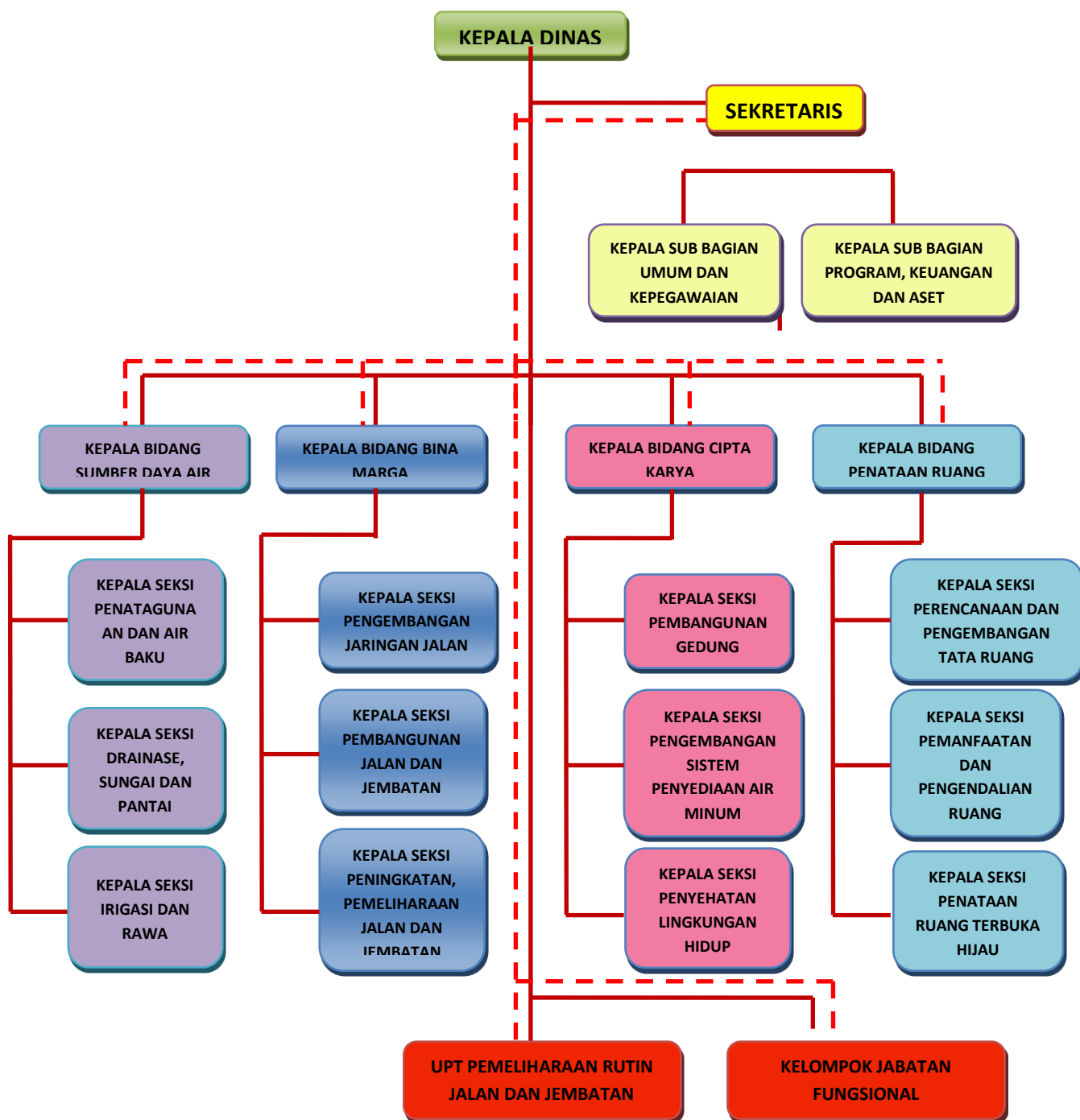
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset
3. Bidang Sumber Daya Air
 - a. Seksi Penatagunaan dan Air Baku
 - b. Seksi Drainase, Sungai dan Pantai
 - c. Seksi Irigasi dan Rawa



4. Bidang Bina Marga
 - a. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Bidang Cipta Karya
 - a. Seksi Pembangunan Gedung
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
6. Bidang Penataan Ruang
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
 - c. Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau
7. UnitPelaksanaTeknis (UPT) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang :





— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi



Secara lebih rinci, berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing bidang kerja memiliki tugas dan fungsi berikut:

- **Sekretariat**

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas.
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggaraa negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis,



perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

- **Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air meliputi penatagunaan dan air baku, drainase, sungai dan pantai, irigasi dan rawa.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penatagunaan dan air baku;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis drainase, sungai dan pantai;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis irigasi dan rawa;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Sumber Daya Air ; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.



Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :

1. Seksi Penatagunaan dan Air Baku mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penatagunaan dan Air Baku;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang penatagunaan dan air baku;
- Melaksanakan perumusan rencana dan tata-kelola sumber-sumber air baku dan tangkapan air lainnya;
- Melaksanakan pengelolaan kawasan lindung sumber air;
- Melaksanakan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air;
- Melaksanakan perizinan penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengusahaan dan/atau pembongkaran bangunan tangkapan air serta sumber air baku, konservasi pada wilayah sumber air baku dan tangkapan air lainnya;
- Melaksanakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kota;
- Melaksanakan sistem informasi sumber air baku;
- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sumber-sumber air baku;
- Melaksanakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dari sumber air.

2. Seksi Drainase, Sungai dan Pantai mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Drainase, Sungai dan Pantai;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis drainase, sungai dan pantai;
- Melaksanakan perumusan rencana dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;



- Melaksanakan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air, perizinan terhadap penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengusahaan dan atau pembongkaran bangunan pada wilayah sungai;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pemutusan genangan;
- Melaksanakan pengendalian daya rusak air;
- Melaksanakan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

3. Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Irigasi dan Rawa;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk Teknis Irigasi Dan Rawa;
- Melaksanakan perencanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembangunan dan peningkatan sistem jaringan primer dan sekunder pada Daerah Irigasi Dan Rawa;
- Melaksanakan perizinan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Sistem Jaringan Irigasi Primer Dan Sekunder Dalam Daerah Irigasi;
- Melaksanakan penyusunan data inventaris luas areal, sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- Melaksanakan Pembentukan Komisi Irigasi Kota;
- Melaksanakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan irigasi dan rawa;
- Melaksanakan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan air untuk keperluan irigasi dan rawa;
- Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Daerah Irigasi Dan Rawa;
- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha.



- **Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang bina marga meliputi pengembangan jaringan jalan, pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan jaringan jalan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Bina Marga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga terdiri atas :

1. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Jaringan jalan;
 - Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan jaringan jalan;
 - Melaksanakan pengembangan sistem jaringan jalan dalam kota;
 - Melaksanakan perencanaan sistem jaringan jalan yang ideal serta penataan jalan perkotaan.



2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan;
 - Melaksanakan pengelolaan leger jalan.
3. Seksi Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, momitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis peningkatan, Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan pengelolaan leger jalan.

- **Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya meliputi pembangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembangunan gedung;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum;



- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan permukiman;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Cipta Karya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembangunan Gedung;
 - Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembangunan gedung;
 - Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan serta pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah;
 - Melaksanakan pendataan bangunan gedung;
 - Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung pemerintah daerah;
 - Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan perizinan usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
 - Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - Mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring,



evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengembangan sistem penyediaan air minum;

- Melaksanakan pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, dan kawasan khusus;
- Melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan petunjuk teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman;
- Melaksanakan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistrem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

- **Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang meliputi perencanaan dan pengembangan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan penataan ruang terbuka hijau.

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penataan ruang;



- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan dan pengembangan tata ruang;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Penataan Ruang;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang;
 - Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk Teknis Perencanaan Dan Pengembangan Tata Ruang;
 - Melaksanakan pengembangan kawasan strategis dan perkotaan;
 - Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang meliputi pengolahan dan penyajian data perencanaan; tata ruang kota (Rencana Rinci);
 - Melaksanakan perencanaan pola ruang kota terutama pada kawasan yang sangat cepat pertumbuhannya dan kawasan strategis;
 - Melaksanakan penyiapan bahan strategi pelaksanaan tata ruang, dan penyebarluasan informasi data base informasi rencana tata ruang;
 - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tentang rencana tata ruang;



- Melaksanakan analisis data pengelolaan survei dan pemetaan ruang, orientasi lapangan, survei dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
 - Melaksanakan pengumpulan dan mengolah peta manual menjadi peta digital.
2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 - Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - Melaksanakan penyusunan legalisasi produk-produk, sosialisasi, informasi, pembinaan masyarakat tentang Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang;
 - Memberikan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang.
3. Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau;
 - Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, faasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk Teknis Penataan Ruang Terbuka Hijau;
 - Melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ditetapkan dalam RTRW.

- **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

UPT adalah pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPT dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Jenjang Jabatan Fungsional/Tenaga Fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Perbulan Desember 2017 sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 108 orang terdiri dari PNS sejumlah 61 orang, pegawai honorer sebanyak 47 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 61 orang terdiri dari 44 laki-laki dan 17 perempuan. Jumlah pejabat struktural 20 orang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 perempuan. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi padabasis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:



a. Bidang Sekretariat :

Jumlah SDM				
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Golongan Jumlah
1.	SD			I 1
2.	SMP	1		II 3
3.	SMA	4		III 6
4.	D.II			IV 2
5.	D.III			
6.	D.IV			
7.	S1	5		
8.	S2	2		
	Jumlah	12		Jumlah 12

b. Bidang Sumber Daya Air :

Jumlah SDM				
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Golongan Jumlah
1.	SD			I
2.	SMP			II 4
3.	SMA	2		III 4
4.	D.II			IV
5.	D.III	2		
6.	D.IV			
7.	S1	3		
8.	S2	1		
	Jumlah	8		Jumlah 8

c. Bidang Bina Marga :

Jumlah SDM				
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Golongan Jumlah
1.	SD			I
2.	SMP			II 5
3.	SMA	5		III 6
4.	D.II			IV 1
5.	D.III	3		
6.	D.IV			



7.	S1	2			
8.	S2	2			
	Jumlah	12		Jumlah	12

d. Bidang Cipta Karya :

Jumlah SDM					
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD			I	1
2.	SMP			II	1
3.	SMA	1		III	4
4.	D.II			IV	1
5.	D.III	1			
6.	D.IV				
7.	S1	2			
8.	S2	3			
	Jumlah	7		Jumlah	7

e. Bidang Penataan Ruang :

Jumlah SDM					
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	1		I	1
2.	SMP			II	1
3.	SMA			III	5
4.	D.II			IV	1
5.	D.III	1			
6.	D.IV				
7.	S1	5			
8.	S2	1			
	Jumlah	8		Jumlah	8

f. UPT :

Jumlah SDM					
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	2		I	5
2.	SMP	3		II	7



3.	SMA	7		III	2
4.	D.II			IV	
5.	D.III	1			
6.	D.IV				
7.	S1	1			
8.	S2				
	Jumlah	14		Jumlah	14

2.2.2. Aset / Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan aset/modal, sarana dan prasarana. Klasifikasi dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang secara garis besar sebagai berikut :

No	Klasifikasi Inventaris	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Gedung/Bangunan	unit	68	1	-
2.	Kendaraan rodaempat	unit	9	3	2
3.	Kendaraan rodadua	unit	32	-	-
4.	Alat Berat	unit	13	-	-
5.	Alat Uji Labolatorium	unit	69	15	2
6.	Komputer	unit	60	6	-
7.	Printer	unit	25	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Penataan Ruang baru digabungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum, sebelumnya berada di Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya, sekarang menjadi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dulu bernama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral tahun 2013 – 2017 dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan (%)				100	100	100	100	100	75,90	68,86	74,09	74,09	96,57	75,90	68,85	74,09	74,09	96,57
2.	Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin (%)				100	100	100	100	-	67,48	63,57	68,07	68,07	-	67,48	63,57	68,07	68,07	-
3.	Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai (%)				100	100	100	100	-	65,61	64,26	68,05	68,05	-	65,61	64,26	68,05	68,05	-
4.	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai (%)				100	100	100	100	-	62,61	62,57	64,52	64,52	-	62,61	62,57	64,52	64,52	-
5.	Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja (%)				100	100	100	100	-	62,29	61,09	63,59	63,59	-	62,29	61,09	63,59	63,59	-
6.	Tingkat kelayakan/kememadain sarana dan prasarana kantor (%)				100	100	100	100	-	63,39	60,35	66,50	66,50	-	63,39	60,35	66,50	66,50	-
7.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana gedung yang ada (%)				100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan aparatur (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,95	100	100	100	100	98,95
9.	Meningkatnya disiplin aparatur (%)				100	100	100	100	-	80	80	85	85	-	80	80	85	85	-
10.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dengan penyelenggaraan bimbingan teknis (%)				100	100	-	-	-	40	100	-	-	-	40	100	-	-	-
11.	Jumlah masyarakat yang mengunjungi stand Dinas PUPR Kota Singkawang (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,50	100	100	100	100	99,50
12.	Meningkatnya pembangunan jalan				39,90 Km	8,96 Km	19,12 Km	28,02 Km	100 %	22,54 Km	11,65 Km	16,92 Km	26,83 Km	99,18 %	56,49 %	129,89 %	88,54 %	95,75 %	99,18 %
13.	Meningkatnya panjang jalan yang ditingkatkan				14,69 Km	16,84 Km	4,98 Km	28,78 Km	-	13,90 Km	16,58 Km	5,36 Km	12,20 Km	-	94,64%	98,44%	107,60 %	42,39%	-
14.	Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun				87 bh	7 bh	7 bh	14 bh	100 %	87 bh	6 bh	6 bh	11 bh	99,69%	100 %	85,71%	85,71%	78,57%	99,69%
15.	Panjang saluran drainase yang dibangun/dipelihara				12,70 Km	5,79 Km	22,06 Km	9,45 Km	-	17,77 Km	8,55 Km	22,06 Km	9,45 Km	-	139 %	147,58 %	100 %	100 %	-
16.	Berfungsinya saluran drainase secara optimal (%)				100	100	100	100	-	60	40	40	40	-	60	40	40	40	-
17.	Terjaganya tebing dari longsor (%)				100	100	100	325	100	100	100	100	325	99,40	100	100	100	100	99,40



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
18.	Rasio jalan yang kondisinya baik				523,90 Km	543,25 Km	547,25 Km	846,03 Km	-	252,48 Km	282,71 Km	298,78 Km	303,69 Km	-	48,19 %	52,04 %	54,60 %	35,90 %	-
19.	Panjang jalan yang dipelihara				20,87 Km	11,07 Km	7,07 Km	4,56 Km	100 %	25,48 Km	14,39 Km	7,70 Km	4,91 Km	97,43 %	122,11 %	129,91 %	108,86 %	107,68 %	97,43 %
20.	Rasio jembatan yang kondisinya baik (%)				100	100	100	100	-	60	60	60	60	-	60	60	60	60	-
21.	Jumlah jembatan yang dapat dipelihara				15 Bh	23 Bh	6 Bh	1 Bh	-	4 Bh	4 Bh	4 Bh	1 Bh	-	26,66 %	17,39 %	66,67 %	100 %	-
22.	Berfungsinya jalan yang dipelihara secara optimal (%)				100	100	100	100	-	100	100	80	80	-	100	100	80	80	-
23.	Berfungsinya jembatan yang dipelihara secara optimal (%)				100	100	100	100	-	100	100	80	80	-	100	100	80	80	-
24.	Persentase jalan kondisinya rusak yang dapat terpelihara (%)				100	100	79,82	4,91	-	24,71	20,49	20,18	4,91	-	24,71	20,49	25,28	100	-
25.	Persentase jembatan kondisinya rusak yang dapat terpelihara (%)				100	100	75,33	1	-	100	100	24,67	1	-	100	100	32,74	100	-
26.	Cakupan tersedianya data kondisi jalan yang lebih akurat (%)				100	100	100	100	-	60	70	75	75	-	60	70	75	75	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
27.	Cakupan tersedianya data kondisi jembatan yang lebih akurat (%)				100	100	100	100	-	60	60	65	65	-	60	60	65	65	-
28.	Kondisi alat-alat berat yang memadai dalam menunjang kegiatan (%)				100	100	100	100	100	60	60	70	70	94,73	100	60	70	70	94,73
29.	Kondisi alat-alat laboratorium yang memadai dalam menunjang kegiatan (%)				100	100	100	100	-	60	60	70	70	-	100	60	70	70	-
30.	Tingkat penanganan daerah rawa				100 %	100 %	3,95 Ha	3,95 Ha	-	80 %	80 %	1,59 Ha	1,50 Ha	-	80 %	80 %	40,25 %	37,97 %	-
31.	Bertambahnya jumlah jaringan irigasi				5,76 Ha	5,76 Ha	5,76 Ha	5,76 Ha	100 %	2,90 Ha	1,78 Ha	5,30 Ha	3,17 Ha	98,52 %	50,33 %	30,89 %	92 %	55,05 %	98,52 %
32.	Rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/cukup (%)				62,00	70	70	70	-	61,39	60	70	70	-	99,02	85,71	100	100	-
33.	Meningkatnya transmisi intake air baku (%)				17	100	100	100	100	3,40	60	60	60	98,52	20	60	60	60	98,52
34.	Lancarnya pembuangan saluran drainase kota				24,00 jam	24,00 Jam	24,00 Jam	70 Jam	100 %	80 jam	80 Jam	80 Jam	70 Jam	99,77 %	333,33 %	333,33 %	333,33 %	100 %	99,77 %



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
35.	Jumlah pengendalian kegiatan usaha pertambangan bantuan dan kegiatan usaha pengambilan air tanah (%)				100	100	100	10	-	80	80	65	10	-	80	80	65	100	-
36.	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan lampu PJU, lampu taman dan lampu hias (%)				100	100	100	76	-	85	85	85	76	-	85	85	85	100	-
37.	Tingkat berfungsinya lampu penerangan jalan (%)				100	100	100	100	-	80	80	84,52	86,99	-	80	80	84,52	86,99	-
38.	Pengembangan kinerja pengolahan air minum dan menurunnya pencemaran air limbah lingkungan perumahan (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	63,55	-	-	-	-	63,55
39.	Meningkatnya kondisi konstruksi irigasi, rawa, sungai dan pantai untuk penanggulangan banjir (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	94,85	-	-	-	-	94,85
40.	Meningkatnya pembangunan gedung pemerintahan yang representatif (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-	99,82
41.	Pengembangan kinerja pengelolaan air bersih (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	98,42	-	-	-	-	98,42



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
42.	Meningkatnya ketersediaan RDTR yang telah tersusun (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	98,58	-	-	-	-	98,58
43.	Bertambahnya jumlah peta yang dibutuhkan oleh pengguna/pemohon (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	85,65	-	-	-	-	85,65
44.	Jumlah konstruksi bangunan reklame yang dibangun sesuai penataan ruang (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	95,62	-	-	-	-	95,62
45.	Penataan RTH (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	98,44	-	-	-	-	98,44



Secara lebih Detail,data anggaran realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang pada periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Uraian ***)	Anggaran padaTahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan AnggaranTahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.362.185.452	3.105.726.000	3.854.656.000	3.369.206.000	2.134.807.000	2.128.330.131	2.814.186.545	3.570.205.067	3.221.121.994	2.061.559.460	90	91	93	96	97	15	15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	534.750.000	1.245.334.000	680.300.000	997.200.000	573.500.000	526.796.000	1.211.070.000	656.981.000	966.186.000	567.473.320	99	97	97	97	99	73	67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	75.000.000	-	-	-	-	68.230.000	-	-	-	0	91	0	0	0	3	2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	100	100	100	100	1	7
Program Penguatan Transparansi Publik	4.500.000	4.600.000	5.000.000	7.000.000	20.000.000	4.600.000	4.600.000	4.900.000	6.900.000	19.900.000	102	100	98	99	99	70	70
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	33.929.951.450	33.457.094.800	42.525.341.000	72.334.482.000	37.512.995.675	30.463.975.865	32.539.677.660	40.546.282.900	71.287.567.681	37.205.056.634	90	97	95	99	99	24	22
Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong	9.886.400.000	6.383.125.000	13.987.610.000	8.412.379.000	6.652.500.000	9.692.868.477	6.280.759.748	13.893.988.600	8.379.119.650	6.636.907.950	98	98	99	99,6	100	62	51
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	1.634.500.000	1.455.000.000	1.722.610.000	1.380.000.000	1.903.250.000	1.629.821.000	1.340.903.000	1.523.349.550	1.127.831.250	1.891.819.550	99,7	92	88	82	99	102	69
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13.872.874.000	9.492.350.000	5.371.960.000	5.835.000.000	8.220.600.000	13.562.613.150	8.613.574.000	5.261.826.400	5.181.476.550	8.009.110.640	98	91	98	89	97	51	47



Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	135.000.000	136.350.000	90.920.800	-	-	133.320.000	135.579.000	89.923.800	-	-	99	99	99	0	0	25	18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	409.000.000	4.061.850.000	594.579.200	120.418.675	1.010.000.000	222.915.000	3.876.263.000	523.003.810	120.220.600	956.732.450	55	95	88	99,8	95	152	114
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	4.656.674.000	6.220.181.000	8.157.280.000	10.803.500.000	15.165.129.000	4.429.969.344	6.205.958.000	8.130.555.650	10.696.364.928	15.043.465.124	95	99,7	99,6	99	99	30	15
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	960.000.000	1.897.000.000	6.321.455.000	4.435.000.000	2.592.000.000	957.226.000	1.863.281.000	6.025.990.650	2.873.939.550	2.553.743.600	99,7	98,2	95	65	100	110	112
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	-	-	-	7.971.000.000	-	-	-	-	5.065.614.218	0	0	0	0	64	0	0
Program Pengendalian Banjir	560.000.000	1.121.000.000	1.178.000.000	5.576.000.000	3.097.500.000	557.055.000	1.116.733.100	1.133.869.250	5.204.317.600	2.938.053.550	99	99,6	96	93	95	50	21
Program Pembangunan Infrastruktur Bangunan Pemerintahan	-	-	-	-	19.809.416.000	-	-	-	-	18.830.167.225	0	0	0	0	95	0	0
Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih	-	-	-	-	3.224.161.000	-	-	-	-	3.173.311.650	0	0	0	0	98	0	0
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	2.130.000.000	-	-	-	-	2.099.729.750	0	0	0	0	99	0	0
Program Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	42.825.000	0	0	0	0	86	0	0
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	135.000.000	-	-	-	-	129.085.000	0	0	0	0	96	0	0
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	-	-	879.662.500	-	-	-	-	865.920.700	0	0	0	0	98	0	0



Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Peningkatan Pembangunan	-	9.134.000	-	-	-	-	4.134.000	-	-	-	0	45	0	0	0	0	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	1.122.600.000	1.051.100.000	172.000.000	803.750.000	-	1.121.815.000	1.041.352.000	21.900.000	802.272.000	-	99,9	99	12,7	99,8	0	0	0
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2.728.900.000	2.837.800.000	2.220.000.000	2.681.200.000	-	2.727.351.250	2.835.694.000	2.215.178.000	2.676.450.478	-	99,9	99,9	99,7	99,8	0	0	0
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Energi Alternatif	970.600.000	1.070.600.000	714.000.000	919.000.000	-	969.952.000	1.066.222.000	713.178.000	910.481.000	-	99,9	99,5	99,8	99	0	0	0



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang telah dideskripsikan pada sub bab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Disisilain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multidimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Tantangan yang utama adalah adanya *trend* pembangunan yang tidak ramah lingkungan, yang diindikasikan dengan adanya alih fungsi lahan (tantangan bagi bidang Tata Ruang), jalan dalam kondisi mantap (tantangan bagi bidang BinaMarga), genangan pada beberapa area di Kota Singkawang (tantangan bagi Bidang Cipta Karya). Selama 5 tahun kedepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang harus dapat mengintegrasikan penanganan *trend* tersebut kedalam program dan kegiatan bidang ke PUan dan Penataan Ruang.

Selain *trend* pembangunan yang tidak ramah lingkungan, terdapat tantangan lain dari segi ketidak jelasan atau tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi antar instansi, sehingga terdapat permasalahan riil dilapangan yang tidak ditangani oleh instansi manapun dan sebaliknya, terdapat *overlap* kewenangan di beberapa instansi. Dalam kontek sini, diperlukan kejelasan kewenangan dan perbaikan tata organisasi pada level Kota. Disamping kewenangan dan tupoksi, tantangan eksternal lain berupa upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang umumnya berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, seperti aksesibilitas jalan, drainase, maupun alokasi tataruang, sehingga keterlibatan masyarakat diharapkan dapat makin meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program dan kegiatan tersebut.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kota, RPJM Kota, dan RTRW Kota Singkawang), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang maupun dengan Perangkat Daerah terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara Perangkat Daerah dalam konsep pembangunan wilayah menuju Singkawang Hebat, sesuai dengan visi Kota Singkawang 2018 - 2022.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:



a. Bidang Sumber Daya Air

1. Belum tersedianya secara optimal Sistem drainase kota, saluran drainase kerap tercampur dengan buangan limbah rumah tangga sehingga pada musim kemarau menjadi bau dan pada musim penghujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, kapasitas saluran drainase menjadi tidak mencukupi. Diperlukan monitoring untuk mencegah masuknya limbah rumah tangga kedalam saluran drainase.
2. Belum tersedianya secara optimal Jaringan irigasi di Kota Singkawang.
3. Masih kurangnya pemenuhan sumber air baku.
4. Masih banyaknya genangan pada beberapa titik lokasi ketika terjadinya hujan.

b. Bidang Bina Marga

Belum seluruhnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan terdapat titik-titik kemacetan merupakan isu strategis atau permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Bina Marga.

Identifikasi isu strategis di bidang Bina Marga berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan.

Dalam konteks tersebut, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) Bidang Bina Marga mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan *smart and sustainable transport* untuk mendukung terwujudnya Singkawang Hebat. Salahsatu kata kunci dalam konsep Singkawang Hebat adalah “integrasi” sehingga pembahasan isu strategis bidang Bina Marga tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga, tetapi juga mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi.

c. Bidang Cipta Karya

Identifikasi isu strategis di Bidang Cipta Karya berangkat dari pemahaman mengenai konsep penciptaan lingkungan yang sehat dan aman (*Health And Safety Environment*) serta *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kedua konsep tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai *Smart City*.



Dalam konteks tersebut, tupoksi Bidang Cipta Karya yang terfokus pada pembangunan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase kawasan memegang peranan penting dalam pencapaian konsep *Health And Safety Environment* serta SDGs. Konsep *Health And Safety Environment* merupakan penjabaran dari konsep *Livable City*, yaitu mewujudkan kondisi lingkungan kota yang sehat dan aman melalui prinsip penyediaan infrastruktur perkotaan sebagai berikut (Lennard,1997):

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah).
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Walaupun ketiga spek tersebut bukan merupakan kewenangan dari Bidang Cipta Karya (terkait adanya perubahan SOTK di tahun 2015), pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan dan konsep *Health And Safety Environment* dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut. Sedangkan untuk permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Cipta Karya antara lain Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses air minum yang layak, masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, dan masih banyaknya bangunan pemerintahan dalam kondisi yang kurang baik.



d. Bidang Penataan Ruang

Identifikasi isu-isu strategis di bidang tata ruang berangkat dari pemahaman mengenai konsep *Effective Spatial Planning* yang merupakan bagian penting dari perwujudan Kota Singkawang sebagai *Smart City*. Konsep *Effective Spatial Planning* memfokuskan pada sistem manajemen pembangunan yang baik dengan “Rencana Tata Ruang” sebagai instrumennya.

Manajemen pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang paling optimal.

Dalam konteks tersebut, rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari Bidang Tata Ruang berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda merupakan payung hukum pengawasan terhadap:

1. Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan dari dokumen tata ruang.
2. Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait dengan upaya realisasi rencana tata ruang.

Disamping fungsi pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi:

1. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;



- 5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan;dan
- 6. Melindungi kepentingan umum.

Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat ini belum seluruh kecamatan di Kota Singkawang memiliki RDTR (rencana detil tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi). Ketiadaan RDTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk pengendalian secara detil masih belum ada. Selain hal diatas permasalahan yang ada dibawah kewenangan Bidang Penataan Ruang belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan tata ruang,dan penataan Ruang terbuka Hijau di Kota Singkawang belum optimal. Identifikasi permasalahan dari tiap-tiap bidang tersebut dapat ditabulasikan ke dalam tabel sebagai berikut:



Tabel Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi SaatIni	Standaryang Digunakan	FaktoryangMempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (DiLuar Kewenangan PD)	
Gambaran pelayanan PD	50,75%jalan dalamkondisi mantap(2017)	SPMPermen PU1/2014yaitu 60%jalan dalamkondisi mantap	1. Peningkatan jalan 2. Pemeliharaan jalan	Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menjaga kegiatan peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan	1. Kurang maksimalnya pekerjaan pada saat kegiatan dilaksanakan sehingga hasilnya kurang memuaskan 2. Belum Seluruhnya jalan dan jembatan di Kota Singkawang dalam keadaan baik 3. Terdapat titik-titik kemacetan



	24,63% drainase dalam kondisi baik	SPM Permen PU 1/2014 yaitu 50% bebas genangan (>30 cm selama 2 jam) Permen PU 12/2014 tentang Drainase Perkotaan	1. Pemeliharaan jaringan drainase 2. Penyusunan indikator yang lebih representatif untuk mengukur kualitas drainase	Masyarakat yang membuang sampah dan limbah rumah tangga sehingga mengurangi kapasitas jaringan drainase	1. Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase 2. Indikator untuk mengukur kualitas drainase kurang representatif 3. Belum tersedianya secara optimal drainase di Kota Singkawang 4. Belum tersedianya secara optimal jaringan irigasi di Kota Singkawang 5. Masih kurangnya pemenuhan sumber air baku
--	------------------------------------	---	--	---	--



	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 42%	Target nasional 81,77% akses air minum	Data spasial Cakupan layanan air minum	Koordinasi dengan PDAM	1. Belum optimalnya kerja sama dengan PDAM untuk penambahan jaringan air minum (sambungan RT) 2. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses air minum yang layak 3. Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik 4. Masih banyaknya bangunan perintang dalam kondisi yang kurang baik
--	--	--	--	------------------------	--



	Belum tersusunnya RTBL pada kawasan prioritas	Permen PU 20/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota	Kapasitas untuk melakukan penyusunan dan review RDTR dan peraturan zonasi serta RTBL pada kawasan prioritas	Proses penyusunan Perda RDTR dan peraturan zonasi cenderung lama di DPRD	1. Belum adanya instrumen rencanatata ruang sehingga alokasi penggunaan ruang pada kawasan prioritas tidak jelas 2. Belum jelasnya kewenangan dan mekanisme pengendalian ketika ada pelanggaran tataruang 3. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang 4. Belum optimalnya pengendalian tata ruang 5. Penataan RTH yang belum optimal
	Belum tersusunnya RDTR dan PZ di seluruh kecamatan di Kota Singkawang				



3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Walikota dan Wakil Walikota selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kota Singkawang 2018-2022, terutamadi bidang kePUan dan Penataan Ruang, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2018-2022 mengacu pada visi Kepala Daerah, yaitu **“ Singkawang HEBAT 2022 ”**.

Kata **“HEBAT”** yang tertera di dalam Visi tersebut memiliki makna strategis, sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;

Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;

Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Uraian nilai strategis dari Visi **Singkawang Hebat 2022** adalah sebagai berikut :

- a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari.

Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

- b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi

ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan



mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

- c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

- d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan.

Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

- e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan bagi daerah di sekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari



beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat di bidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Visi pembangunan Kota Singkawang dalam RPJMD 2018-2022 diterjemahkan kedalam 7 misi. Masing-masing misi diperinci kedalam tujuan dan sasaran. Secara skematis, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Singkawang 2018-2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif, dan toleran 2. Meningkatnya pengembangan dan kelestarian budaya
2.	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri	1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Daya Saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif 2. Meningkatnya investasi daerah 3. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat	1. Meningkatkan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatnya produksi Pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah



		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 1. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan
4.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah, dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan 3. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal
5.	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan
6.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 2. Menurunnya kawasan genangan banjir
7.	Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata	1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	1. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan 2. Berkembangnya sektor pariwisata

Dari rangkaian misi-tujuan-sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah pada pencapaian misi ketiga dan keenam. Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan pencapaian dilakukan pada level *outcome* dan *impact* (bukan pada level *output*, yang hanya berbasis pada pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain.



Telaah terhadap visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Harmonis dalam keberagaman Agama, Etnis dan Budaya; Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri; Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan; Adil dan merata dalam pembangunan insfrastruktur, kesehatan dan pendidikan; Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat			
	Program Perencanaan TataRuang	Belum tersusunnya RTBL pada kawasan prioritas	Proses penyusunan Perda RDTR dan peraturan zonasi	Investasi swasta yang cukup tinggi pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis
	Program Pemanfaatan Ruang	Belum tersusunnya RDTR dan PZ diseluruh kecamatan di Kota Singkawang	cenderung lama di proses persetujuan substansi	sebagai kawasan strategis dantumbuhcepat
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Permohonan Perizinan



Visi: Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya; Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri; Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan; Adil dan merata dalam pembangunan insfrastruktur, kesehatan dan pendidikan; Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Misi6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan			
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terjadinya permasalahan dalam hal pembebasan lahan	Terdapat okmun masyarakat yang menolak untuk pembebasan lahan	Adanya Pendekatan kepada masyarakat sekitar lokasi pembebasan lahan
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat tidak dapat terpenuhi pemeliharaannya secara tuntas dalam satu ruas	Keterbatasan anggaran (APBD) Kota Singkawang	Adanya alternatif penganggaran dari propinsi atau pemerintah pusat melalui proposal yang dibuat
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Perlunya data kondisi jalan dan jembatan setiap tahun, jika ada perencanaan yang mendesak dapat direncanakan secepatnya	Keterbatasan anggaran di Kota Singkawang	Adanya alternatif penganggaran dari propinsi/ pemerintah pusat melalui proposal yang dibuat
	Program Penyelenggaraan Jalan	Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat yang harus ditangani	Keterbatasan anggaran (APBD) Kota Singkawang	Adanya alternatif penganggaran dari propinsi atau pemerintah pusat melalui proposal yang dibuat
		Adanya permasalahan dalam hal pembebasan lahan	Terdapat okmun masyarakat yang menolak untuk pembebasan lahan	Adanya Pendekatan kepada masyarakat sekitar lokasi pembebasan lahan



Visi:Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya; Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan; Adil dan merata dalam pembangunan insfrastruktur, kesehatan dan pendidikan; Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata

No	Misidan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan PelayananPerangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Rentannya kualitas dan kuantitas air baku	Adanya perusakan sumber air baku	Kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber air baku
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Banyaknya kondisi Sarana pengelolaan Sumber Daya Air yang harus ditangani	Keterbatasan anggaran (APBD) Kota Singkawang	Adanya alternatif penganggaran dari propinsi atau pemerintah pusat melalui proposal yang dibuat
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Sulitnya masyarakat untuk memberikan lahan tempat pembangunan IPAL Komunal	Kesulitan dalam menentukan lokasi pekerjaan	Adanya pendekatan dengan masyarakat dan pemuka masyarakat
	Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih	Menurun Kualitas, Kuantitas dan kontinuitas air baku air minum	Keterbatasan anggaran (APBD) Kota Singkawang	Adanya alternatif penganggaran dari propinsi atau pemerintah pusat melalui proposal yang dibuat
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sulitnya masyarakat untuk memberikan lahan tempat pembangunan IPAL Komunal	Kesulitan dalam menentukan lokasi pekerjaan	Adanya pendekatan dengan masyarakat dan pemuka masyarakat
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Penanganan sampah belum optimal	Minim pengelolaan pelayanan persampahan yang kredible dan profesional	Adanya stimulasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah



	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kurang ditegakkannya aturan tata bangunan dan keandalan pada Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah Pesisir perkotaan	Lemahnya pengaturan penyelenggaraa n Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan	
	Program Pengendalian Banjir	Sungai dan saluran primer untuk pengendali banjir mengalami pendangkalan	Tepian sungai / saluran primer sudah banyak permukiman penduduk sehingga akses menuju lokasi sulit	Adanya pembersihan secara manual
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Pemukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran	Bangunan sudah permanen	Adanya pendekatan kepada masyarakat pada sekitar lokasi
	Program Pembangunan Turap / Talud Bronjong	Terdapat bangunan yang berada pada tepi tebing sungai / saluran	Bangunan sudah permanen	Adanya pendekatan kepada masyarakat pada sekitar lokasi
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pemukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran	Bangunan sudah permanen	Adanya pendekatan kepada masyarakat pada sekitar lokasi
	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Diperlukannya perencanaan masterplan jaringan irigasi dan rawa setiap kecamatan, agar dapat mengetahui luas baku, potensi dan fungsi pada lahan pertanian	Terdapat oknum masyarakat petani yang menolak dibangun pintu air untuk mengairi area sawah	Masyarakat pemakai air untuk lahan pertanian sangat membutuhkan pembagian air yang merata ke area persawahan



	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Belum terlaksananya kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi di Kota Singkawang	Baru akan disusunnya Peraturan Daerah tentang Tusi Pengembangan Jasa Konstruksi di Kota Singkawang	Adanya Permen 90 Tahun 2019 yang mengharuskan adanya Pengembangan Jasa Konstruksi dalam Tusi Dinas PUPR
	Program Pengembangan Permukiman	Banyaknya infrastruktur dasar yang kurang layak diwilayah permukiman	Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga infrastruktur permukiman yang telah ada	Tingginya semangat Pemerintah Daerah untuk mengembangkan wilayah permukiman di Kota Singkawang

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Analisis renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari Dinas PUPR Kota Singkawang terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level Propinsi dan nasional. Di samping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Dinas PUPR Kota Singkawang terhadap pencapaian target kinerja di level Propinsi dan nasional. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi antara capaian sasaran renstra Dinas PUPR Kota Singkawang terhadap sasaran renstra Dinas PUPR Propinsi Kalimantan Barat dan renstra Kementrian PU dan Perumahan Rakyat. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat sinkronisasi program di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan pada level kota – propinsi – nasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan pada level Kota – Propinsi – Nasional.



Tabel Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas PUPR Kota Singkawang terhadap Sasaran Renstra Dinas PUPR Prop.Kalbar dan Renstra Kementerian PUPERA

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DPUPR Kota Singkawang	Sasaran pada Renstra DPUPR Prop. Kalbar	Sasaran pada Renstra Kementerian PUPERA
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	60,80%	83,08%	60%
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	49,72%		60%
3.	Persentase panjang jalan yang dipelihara	18,52%		
4.	Persentase panjang jembatan yang dipelihara	12%		
5.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	34,33%		
6.	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	38,89%		
7.	Persentase sungai/parit rawan longsor dalam kondisi baik	44,55%		
8.	Persentase jalan dan jembatan yang diinspeksi	50%		
9.	Persentase Intake dalam kondisi baik	66,25%		
10.	Persentase pipa transmisi air bersih dalam kondisi baik	82%		• 100% akses air minum • 8.179 liter/detik • 308 IKK • Pembinaan 120 PDAM
11.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih	4,71%	54.65%	
12.	Persentase infrastruktur air minum yang dipelihara	25%		
13.	Persentase rumah tangga memiliki sanitasi baik	45%	47.32%	
14.	Persentase luas genangan	4,2%		Luas kawasan yang Terlindung dari bahaya banjir 31.704.43 ha
15.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	24,63%		
16.	Persentase bangunan pemerintah yang memenuhi syarat	75%		



17.	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum	90%		• Pembinaan konstruksi 56 kab/kota • Pelayanan teknis yang diterima stakeholder 50,85%
18.	Persentase rencana tata ruang yang disusun	78%		
19.	Persentase ketaatan rencana tata ruang	90%		

Komparasi antara capaian renstra DPUPR Kota dan sasaran renstra DPUPR Propinsi Kalimantan Barat dan Renstra Kementerian PUPERA hanya dapat dilakukan secara garis besar, karena beberapa indikator kinerja Dinas PUPR Kota Singkawang mengatur hal-hal yang kewenangannya berada pada tingkat kabupaten sehingga tidak muncul pada target sasaran di level propinsi ataupun nasional.

3.3.1 Telaah Renstra pada Kementerian PUPERA dan Kementerian ATR

Telaah renstra pada Kementerian PUPERA dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah Kementerian PUPERA dan identifikasi permasalahan yang dihadapi DPUPR Kota Singkawang untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong. Secara lebih detail, komparasi terhadap sasaran renstra Kementerian PUPERA dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel Komparasi terhadap Sasaran Renstra Kementerian PUPERA

No	SasaranJangka Menengah Kementerian PUPERA	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Singkawang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya layanan Jaringan irigasi dan rawa	Masyarakat membutuhkan pembangunan fasilitas pintu air sesuai dengan kebutuhan area lahan pertanian	Terdapat oknum masyarakat petani yang menolak dibangunnya fasilitas bangunan pintu air untuk mengairi area sawah	Masyarakat pemakai air untuk lahan pertanian sangat membutuhkan pembagian air yang merata ke area persawahan
2.	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan	Sumber air baku tidak mencukupi (kualitas dan kuantitasnya)	Adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	Penghijauan / Pelestarian sumber air baku
3.	Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir	Sungai dan saluran primer untuk pengendali banjir mengalami pendangkalan	Tepian sungai/saluran primer sudah banyak permukiman penduduk sehingga akses menuju lokasi sulit	Adanya pembersihan secara manual
4.	Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah	Masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan terutama jalan kota/daerah sedangkan jalan nasional ditangani oleh pusat	Keterbatasan anggaran	Tambahan sumber dana /anggaran baik dari Propinsi maupun dari Pemerintah pusat melalui proposal
5.	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan	Jaringan air bersih belum terpenuhi dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sanitasi	Adanya kebocoran jaringan air bersih dan kurangnya sosialisasi tentang sanitasi	- Tambahkan sumber dana APBN - - Pemukiman penduduk masih belum padat



6.	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang	Kegiatan pembangunan belum sepenuhnya menngacu padarencana tataruang	Sebagian wilayah belum memiliki RDTRdan PZyang sudah ditetapkan dalam bentuk Perda	RTRWKota Singkawang telah ditetapkan denganPerda
----	---	--	--	--

3.3.2 Telaah Renstra DPUPR

Telaah renstra pada DPUPR Propinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah renstra DPUPR dan identifikasi permasalahan yang dihadapi DPUPR Kota Singkawang untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong. Secara lebih detail, komparasi terhadap sasaran renstra DPUPR dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Komparasi terhadap Sasaran Renstra DPUPR Prop. Kalbar

No	Sasaran Jangka Menengah RenstraDPUPR Prop. Kalbar	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Singkawang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Tata Ruang	Inkonsistensi pemahaman RTRW	Kesesuaian lokasi terhadap kebutuhan daerah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana	Adanya sinergitifitas antara Propinsi dengan Kab/Kota
2.	Peningkatan, pembinaan, dan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air	- Infrastruktur terbangun kurang dari 70% - Tidak ada lagi tenaga honorer terhadap penjaga bangunan air	- Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna air terhadap bangunan atau infrastruktur pengairan - Politikalwil dari pemerintah terhadap ketersediaan infrastruktur pengairan perlu ditingkatkan	- Poktan (Kelompok Tani) dan masyarakat sadar lingkungan - Politikalwil pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
3.	Pengendalian kualitas pelaksanaan konstruksi bidang ke-PU-an yang mantap dan terukur melalui pengujiandengan didukung oleh sumber daya masyarakat jasa konstruksi yang profesional	Jumlah SDM dan kualitas di bidang jasa konstruksi masih kurang	Belum adanya seksi yang menangani jasa konstruksi	Tertibnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi
4.	Meningkatkan kemampuan pegawai yang profesional di bidang infrastrukturke-PUan dengan didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan tata laksana organisasi dengan prinsip Good Goverment	Jumlah SDM yang profesional di bidang infrastruktur ke-PUan belum memadai	Proses sertifikasi yang masih kurang objektif dan mahal sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga profesional dan terampil di bidang infrastruktur ke-PUan masih jauh dari cukup	Adanya prasarana dan sarana pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang infrastrukturke-PUan



3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang ke-PU-an.

Hasil telaahan struktur ruang wilayah RTRW Kota Singkawang 2013 - 2032 terhadap pelayanan dan arahan lokasi pengembangan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Singkawang 2013 - 2032

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1.	Sistem pusat kegiatan: - PPK - SPPK - PL - PPK	Sistem pusat Kegiatan sesuai dengan rencana	A. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) 1. Percepatan Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kota) Mendorong Perkembangan bagian PPK yang belum Termanfaatkan secara efisien 2. Revitalisasi dan percepatan pengembangan bagian strategis dari PPK 3. Pengendalian perkembangan bagian kawasan PPK berbasis Mitigasi Bencana B. Perwujudan Subpusat Pelayanan (SPK) 1. Percepatan pengembangan SPK 2. Revitalisasi dan percepatan pengembangan SPK 3. Mendorong perkembangan SPK 4. Pengendalian SPK berbasis Mitigasi Bencana	Harus dapat Menjamin bahwa pusat-pusat kegiatan terhubung melalui sistem jaringan mobilitas	A. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota 1. Kecamatan Singkawang Tengah dan Barat 2. Kelurahan Roban 3. Kelurahan Sekip Lama 4. Kelurahan Pasiran, Kuala, Sei Wie, dan Sei Garam B. Perwujudan Subpusat Pelayanan (SPK) 1. Sedau 2. Setapuk Besar 3. Pajintan, Bagak, Lirang, dan Sagatani 4. Sedau dan Setapuk Besar C. Perwujudan Pusat Lingkungan (PL) 1. Pusat – pusat lingkungan yang berada di kawasan strategis 2. Pusat – pusat lingkungan yang berada relative jauh dari daerah rawan bencana namun berpotensi cepat berkembang untuk meningkatkan keefektifan pelayanan Kota 3. Pusat – pusat lingkungan di daerah rawan bencana 4. Pusat – pusat lingkungan di daerah yang



			C. Perwujudan Pusat Lingkungan (PL) 1. Percepatan pengembangan PL 2. Revitalisasi dan percepatan pengembangan PL 3. Pengendalian PL berbasis Mitigasi Bencana 4. Mendorong perkembangan PL berbasis pemberdayaan masyarakat		Kurang potensial atau relatif lambat kecendrungan perkembangannya.
--	--	--	---	--	--

Hasil telaahan pola ruang wilayah RTRW Kota Singkawang 2013-2032 terhadap pelayanan dan arahan lokasi pengembangan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Singkawang 2013-2032

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1.	Kawasan lindung	Ditemukan beberapa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang budidaya pada kawasan lindung setempat	Kawasan lindung setempat	Pengendalian tata ruang perlu lebih diperjelas dan diperketat mekanisme pengendaliannya	Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung setempat sesuai dengan arahan pola ruang
2.	Kawasan budidaya	Sesuai	Kawasan budidaya	Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi pada 5 kecamatan di Kota Singkawang	5 kecamatan di Kota Singkawang

Setelah menelaah struktur ruang dan pola ruang, berikut identifikasi permasalahan berdasarkan telaah RTRW Kota Singkawang 2013-2032 :



Tabel Komparasi terhadap Telaah RTRW Kota Singkawang 2013-2032

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DPUPR Kota Singkawang	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Singkawang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang	Belum disusunnya RTBL Pada seluruh kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai PKN	Terdapat kecamatan yang belum memiliki RDTR dan PZ sebagai basis penyusunan RTBL	Tingginya investasi padakawasan aglomerasi perkotaan yang juga berfungsi sebagai PKN
2.	Rencana jaringan transportasi	- Jalan dan jembatan kabupaten belum seluruhnya dalam kondisi mantap sesuai dengan target nasional - Adanya titik-titik kemacetan akibat tidak ada integrasi transportasi publik yang baik	- Belum tersusunnya rencana sistem transportasi perkotaan terpadu ataupun rencana sistem transportasi regional - Database ruas jalan masih belum <i>update</i> karena keterbatasan SDM	- Perlu kerjasama Yang baik dengan Dinas Perhubungan dan BAPPEDA untuk menyusun sistem transportasi perkotaan - Perlu kerja sama yang baik dengan Propinsi Kalimantan Barat Untuk penyusunan rencana sistem transportasi regional
3.	Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan (air bersih, drainase, persampahan)	- Belum terpenuhinya Aksesairbersih100% - Belum ada sistem pengelolaan drainase terpadu sehingga banyak terjadi genangan, terutama dikawasan perkotaan dan permukiman padat	- Belum ada analisis potensi genangan ataupun masterplan drainase	- Perlu kerjasama yang baik dengan PDAM
		- Cakupan layanan persampahan masih belum optimal	- Kurangnya kesadaran masyarakat (cth: membuang limbah rumah tangga ke saluran drainase)	- Terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sampah mandiri



4.	Rencana Pola Ruang	- Belum terpenuhinya target 0% permukiman kumuh sehingga diperlukan upaya perbaikan lingkungan permukiman	- Penyediaan lahan Untuk RTH perkotaan maupun pengembangan perumahan baru cukup sulit	- Terdapat SK Walikota tentang permukiman kumuh sebagai prioritas penanganan perbaikan lingkungan permukiman
----	--------------------	---	---	--

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis-analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Terdapat 6 kajian dalam KLHS, yaitu (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (2) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, (3) kinerja layanan/jasa ekosistem, (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tabel Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS Kota Singkawang	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas PerkerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kota Singkawang
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Program perencanaan tataruang dapat membawa pengaruh negatif(contoh kerusakan lingkungan) jika alokasi ruang tidak disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung.	Alih fungsi lahan tidak boleh mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Alokasi ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung



Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Dampak dan resiko lingkungan hidup akibat pembangunan antarlain peningkatan <i>runoff</i> , pengurangan area resapan (termasuk RTH), peningkatan limbah, pencemaran, kemacetan	Kajian dampak dan Resiko lingkungan hidup diperlukan sebagai bagian dari perizinan sebelum program pembangunan dilaksanakan	Kontrol dan pengawasan terhadap persyaratan perizinan lingkungan untuk setiap pembangunan sarana dan prasarana
Kinerja layanan/jasa ekosistem	Program pembangunan sarana dan prasarana berpotensi alih fungsi lahan dan mengurangi RTH yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem	Alokasi RTH dalam rencana tata ruang perlu dipenuhi dan dijaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan	• Pembangunan RTH Dan penghijauan di sepanjang jalan • Penegakan peraturan penataan ruang
Efisiensi Pemanfaatan sumber daya alam	Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pedesaan berpotensi memicu alih fungsi lahan dan urbanisasi sehingga terjadi inefisiensi pemanfaatan SDA yang di indikasikan dengan adanya penurunan muka air tanah, pencemaran lingkungan, dan kemacetan	Program pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana menggunakan konsep hematenergi sehingga tercapai efisiensi Pemanfaatan sumber daya alam	• Pembangunan sarana dan prasarana (olahraga, ekonomi, pendidikan, perkantoran) dengan konsep <i>green building</i>
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana berpotensi meningkatkan <i>runoff</i> dan mengurangi RTH sehingga menjadikan Kota Singkawang rentan terhadap perubahan iklim (indikasi adanya genangan di beberapa lokasi)	Perbaikan drainase Ataupun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya perlu mempertimbangkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	• Sistem drainase yang dibangun/diperbaiki harus harmonis dengan lingkungan perkotaan • Pembangunan drainase jalan yang ramah lingkungan • Perlunya sosialisasi pelarangan pembuangan air limbah maupun sampah padat disaluran drainase beserta penegakan aturan
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Adanya potensi alih fungsi lahan jika pemanfaatan ruang tidak terkendali yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan (kurangnya ketahanan dan keanekaragaman hayati)	Perlunya program dan kegiatan yang fokus pada pengawasan dan pengendalian rencana tata ruang	Menegakkan peraturan penataan ruang

Berdasarkan bidang kajian KLHS, terdapat beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap bidang kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Aspek tersebut diantaranya adalah (1) pentingnya analisis daya dukung dan daya tampung dalam alokasi tata ruang Kota Singkawang, (2) tingginya laju konversi lahan pertanian kelahan terbangun, serta (3) kurang optimalnya



pengendalian tata ruang. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan yang berpusat pada aspek pengendalian tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal ini dengan memberi prioritas pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Disisilain, rencana program dan kegiatan yang bertumpu pada alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun (contoh : pembangunan sarana ekonomi, pembangunan jalan dan jembatan, serta pengembangan perumahan) perlu dilakukan dengan konsep yang menekankan pada harmonisasi dengan alam dan diperketat pada proses perizinan kajian dampak lingkungan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.

Berikut tabel yang menunjukkan identifikasi permasalahan berdasarkan analisis KLHS:

Tabel Komparasi terhadap Telaah KLHS

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi DPUPR Kota Singkawang	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Singkawang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Analisis daya dukung (terutama ketersediaan air tanah) tidak mencukupi (cenderung defisit)	Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (RDTR dan PZ belum ada dan belum di Perdakan) sehingga sulit untuk mengontrol pemanfaatan ruang	- Proses legalisasi RDTR dan PZ Cenderung lama - Keterbatasan kapasitas SDM untuk melakukan analisis daya dukung	Perda RTRW sebagai payung hukum pengendalian pemanfaatan ruang walaupun belum terlalu rinci
2.	Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim (peningkatan suhu di daerah perkotaan dan peningkatan intensitas hujan)	Jaringan drainase di Kota Singkawang belum dirancang untuk menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim	Analisis tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim belum dilakukan karena keterbatasan SDM, data, dan teknologi	Analisis tingkat kerawanan bencana telah mulai dilakukan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota, telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, serta telaah RTRW dan KLHS, dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan



atau mempengaruhi Perangkat Daerah dari faktor-fakto reksternal lainnya. Secara lebih spesifik, isu-isu strategis tersebut dapat diidentifikasi berdasar isu strategis pada lingkup internasional, nasional, ataupun regional/lokal pada tabel berikut :

Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	Daya dukung	Target 100% akses air bersih	Database kondisi jalan per 25 meter Ruas jalan tidak lengkap dan tidak <i>uptodate</i>	
2.		Pengendalian pemanfaatan ruang	Kualitas rencana detil (RDTR dan Peraturan Zonasi belum ada atau masih dalam tahap penyusunan)	
3.		Ketersediaan RTH publik Dikawasan kumuh	Drainase(genangan)	
4.		Akses MBR terhadap Perumahan layak	Buangan limbah rumah tangga ke drainase jalan	
5.			Pemanfaatan ruang (terutama implementasi RTH dan penataan kawasan sempa dan sungai)	

Isu-isu strategis dalam konteks ini merupakan isu yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan kegiatan dari DPUPR Kota Singkawang. Identifikasi prioritas tersebut ditandai dengan isu yang kerap disebut (ditemui) dalam telaah-telaah sebelumnya. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja DPUPR Kota Singkawang adalah sebagai berikut:



Tabel Isu-Isu Strategis yang Menjadi Prioritas DPUPR Kota Singkawang

Unit Kerja	Aspek	Permasalahan	Rekomendasi Prioritas Kegiatan	Keterangan
Bina Marga	Pembangunan jalan	Terdapat titik-titik kemacetan	Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan	
	Peningkatan jalan	Terdapat titik-titik kemacetan	Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan	
Sumber Daya Air	Drainase	Belum terdapat Master plan drainase	Penyusunan master plan drainase	
		Belum terdapat analisis/peta potensi genangan/banjir	1. Pemetaan genangan 2. Pembuatan sumur resapan	
Cipta Karya	Air bersih	1. Cakupan air bersih belum 100% 2. Kualitas air bersih tidak terpantau, terutama pada rumah tangga	Penambahan Jaringan air bersih	Kerjasama dengan PDAM
	Limbah	Bercampurnya pembuangan limbah rumah tangga disaluran drainase	Sosialisasi dan monitoring untuk mencegah masuknya limbah ke saluran drainase	Diperlukan koordinasi dengan DLH
Penataan Ruang	Pemanfaatan ruang	Tidak optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang karena RDTR dan PZ sebagai instrumen pengendalian belum di Perdakan	Legalisasi dan implementasi RDTR dan PZ	
		Belum ada mekanisme yang jelas mengenai tindakan penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang	Monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang	Diperlukan kerjasama dengan BAPPEDA dan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, SatPol PP



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil review terhadap visi dan misi RPJMD Kota Singkawang, review terhadap tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022, serta review terhadap perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan atau *guide line* dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang.

Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 5 tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama (IKU) bidang Pekerjaan Umum maupun standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUPR Kota Singkawang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 3 :Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat									
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan RTRW(%)	90	100	100	100	100	100
			Rasio RTH	0,09	10	20	42,49		
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan									
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur Dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap (%)	50,75	53	55,3	53,79	55,93	58,29
		Meningkatnya akses penduduk terhadap pelayanan air minum	Persentase Masyarakat Pengguna Air Bersih (%)	37,60	37,80	38	38,44	38,63	38,83
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi syarat (%)	75	76	77	80	81,82	83,64
		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	36,02	40	45	49,23		
		Terlaksananya Penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional					30	60



		Meningkatnya Penataan Bangunan dan permukiman lingkungan sesuai penataan ruang /Arah pemanfaatan ruang	Persentase permukiman yang tertata (%)					73,56	75,56
		Meningkatnya Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi baik					70	72
		Meningkatnya Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Persentase Sungai/Parit Rawan Longsor yang menggunakan Turap/Talud/Bronjong					7,68	8,55
			Persentase Intake Dalam Kondisi Baik					57,69	65,38
			Persentase Daerah irigasi yang tertangani					10,06	17,24
2	Menurunnya kawasan genangan banjir	Meningkatnya sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	Luas kawasan genangan banjir	38,89	40,85	42,07	61,13	63	65,03



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kota Singkawang. Perumusan strategi dibahas melalui serial FGD (*Focus Group Discussion*) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Kebijakan Pelayanan DPUP KotaSingkawang

Visi : Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya; Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri; Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan; Adil dan merata dalam pembangunan insfrastruktur, kesehatan dan pendidikan; Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata			
Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana RTRW	1. Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	• Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL. • Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang. • Penyusunan rencana tata ruang wilayah. • Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL). • Review rencana tata ruang • Survey dan Pemetaan (Penataan Garis Sempadan Pantai). • Fasilitasi persetujuan substansi RAPERDA tentang RTRW dan Penetapan PERDA RTRW Kota Singkawang. • Pembuatan Peta Topografi • Survey dan pemetaan • Perencanaan Taman Kota • Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang • Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang • Penyediaan peta dasar dan tematik • Updating informasi tata ruang • Pemanfaatan Taman Kota



Visi : Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya; Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri; Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan; Adil dan merata dalam pembangunan insfrastruktur, kesehatan dan pendidikan; Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata			
Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam UpayaPeningkatan Pendapatan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana RTRW	1. Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	• Pemeliharaan Taman Kota • Fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang • Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang • Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang • Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang • Advise untuk mendukung IPPT • Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kota Singkawang • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota • Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		2. Melaksanakan pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman



Visi : Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya; Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri; Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan; Adil dan merata dalam pembangunan insfrastruktur, kesehatan dan pendidikan; Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata			
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Melakukan pembangunan / peningkatan infrastruktur jalan	• Perencanaan pembangunan jalan. • Pembangunan jalan. • Perencanaan Pembangunan Jembatan. • Pembangunan Jembatan • Peningkatan jalan • Perencanaan peningkatan jalan • Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan • Rehabilitasi/pemeliharaan jalan • Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan • Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan • Inspeksi Kondisi Jalan • Inspeksi Kondisi Jembatan • Perencanaan Pengembangan Jalan • Survey Kondisi Jalan dan LHR • Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
	Meningkatnya akses penduduk terhadap pelayanan air minum	Melakukan pembangunan dan penyediaan akses air minum, air bersih dan sanitasi untuk penduduk	• Penyediaan prasarana dan sarana air limbah. • Pengadaan Jaringan Air Bersih. • Pengembangan distribusi air minum. • Penyediaan dan pengolahan air baku • Peningkatan SPAM dikawasan perkotaan
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Melakukan pembangunan dan renovasi gedung pemerintahan	• Pembangunan infrastruktur bangunan pemerintah



Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Melakukan pembangunan dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi	• Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. • Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun. • Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
	Terlaksananya Penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Melaksanakan Sistem Pengelolaan persampahan Regional	• Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
	Meningkatnya Penataan Bangunan dan permukiman lingkungan sesuai penataan ruang /Arah pemanfaatan ruang	Melakukan penataan bangunan dan lingkungannya	• Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Melakukan pembangunan dan pemeliharaan terhadap prasarana Sumber daya air	• Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah irigasi
	Meningkatnya Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Melakukan pengembangan infrastruktur permukiman	• Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten / Kota
Menurunnya kawasan genangan banjir	Meningkatnya sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	Melakukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir	• Pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan salurandrainase/gorong-gorong. • Pembangunan turap/talud/bro njong. • Penataan, Pengeloolaan dan pemanfaatan sungai



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Pada bidang umum dan kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (renstra). Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif untuk Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang 2018-2022 berpedoman pada Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 90 Tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut :



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PERNDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018 – 2020
BERDASARKAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

SKPD: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada tahun 2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17
1.03.1.0 3.01.00 1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan Administrasi perkantoran (%)	60,17	100%	2,365,359,000.00	100%	2,405,670,000.00	100%	2,903,311.825.00	300%	7,674,340,825.00	
1.03.1.0 3.01.00 1.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	1095 Surat Masuk/ 525 Surat Keluar	100%	7,410,000.00	100%	7,600,000.00			100%	15,010,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.00 1.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	41000 Kwh untuk listrik 170000 untuk rekening telpon	12 bulan	369,250,000.00	12 bulan	343,960,000.00	12 bulan	253,860,000.00	36 Bulan	967,070,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	KIR dan pajak untuk 9 kendaraan roda 4 1095 Surat Masuk/ 525 Surat Keluar	100%	29,600,000.00	100%	29,600,000.00	100%	25,000,000.00	100%	84,200,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan	100%	44,487,000.00	100%	46,000,000.00	100%	22,882,600.00	100%	113,369,600.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	15 buah komputer dan 20 Buah printer	100%	17,500,000.00	100%	18,000,000.00	100%	18,400,000.00	100%	53,900,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.00 1.010	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	48 jenis	100%	132,250,000.00	100%	140,000,000.00	100%	64,222,000.00	100%	336,472,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18 jenis	100%	123,064,000.00	100%	130,000,000.00	100%	117,047,825.00	100%	370,111,825.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	120 Titik	100%	21,027,480.00	100%	23,130,228.00	100%	22,328,400.00	100%	66,486,108.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis barang	100%	134,000,000.00	100%	137,000,000.00	100%	248,065,500.00	100%	519,065,500.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Media	12 bulan	6,000,000.00	12 bulan	6,600,000.00	12 bulan	6,000,000.00	36 Bulan	18,600,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.00 1.017	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan	16 Kali Pertemuan	100%	41,400,000.00	100%	45,540,000.00	100%	27,320,000.00	100%	114,260,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	12 bulan	100%	740,387,000.00	100%	740,000,000.00	100%	320,054,000.00	100%	1,800,441,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.019	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 bulan	100%	698,983,520.00	100%	260,639,772.00	100%	241,711,500.00	100%	1,201,334,792.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 1.020	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Cakupan jasa administrasi perkantoran yang disediakan	Kegiatan ini belum ada di tahun 2017	-	0	100%	477,600,000.00	100%	1,536,420,000.00	100%	2,014,020,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan Sarana prasarana aparatur (%)	53,56	100%	428,900,000.00	100%	437,480,000.00	100%	480,828,669.00	300%	1,347,208,669.00	
1.03.1.0 3.01.00 2.019	Pemeliharaan rutin/berkala taman	Cakupan taman yang dipelihara	12 bulan	100%	15,000,000.00	100%	16,500,000.00	100%	8.997.269.00	100%	40,497,269.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.00 2.024	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	100%	167,900,000.00	100%	170,000,000.00	100%	73,230,000.00	100%	411,130,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 2.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	12 bulan	100%	6,000,000.00	100%	6,600,000.00	100%	6,500,000.00	100%	19,100,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 2.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Cakupan Gedung Kantor yang direhabilitasi	12 bulan	100%	240,000,000.00	100%	244,380,000.00	100%	392,101,400.00	100%	876,481,400.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	100%	17,485,000.00	100%	10,000,000.00	100%	21,953,025.00	300%	49,438,025.00	
1.03.1.0 3.01.00 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	7 dokumen	4,000,000.00	7 dokumen	5,000,000.00	7 dokumen	7,565,250.00	23 Dokumen	16,565,250.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.00 6.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang dibutuhkan	1 dokumen	1 dokumen	9,485,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	14,387,775.00	4 Dokumen	28,872,775.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 6.006	Penyusunan renstra Perangkat Daerah	Jumlah laporan Renstra Perangkat Daerah	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	1 dokumen	4,000,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	1 Dokumen	4,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.00 7	PROGRAM PENGUATAN TRANSPARANSI PUBLIK	Persentase transparansi	100%	100%	19,000,000.00	100%	20,100,000.00	100%	31,275,000.00	100%	70,375,000.00	
		Publik (%)										
1.03.1.0 3.01.00 7.001	EXPO Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,000,000.00	1 Kegiatan	20,100,000.00	1 Kegiatan	31,275,000.00	4 Kegiatan	70,375,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
4.05.4.0 5.07.05 1	PROGRAM PENATAAN DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI	Persentase Penilaian Bobot Jabatan Dalam			0	100%	7,000,000.00	100%	10,414,850.00	200%	17,414,850.00	
		Penetapan Standar Gaji PNS (%)										



4.05.4.0 5.07.05 1.012	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	1 dokumen	7,000,000.00	1 dokumen	7,250,000.00	2 Dokumen	14,250,000	Dinas PUPR Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 5	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan yang dibangun dan ditingkatkan (%)	8.5	9	41,606,112,975.00	9.5	47,229,270,000.00	1.37	11,413,200,320.00	1.37	100,248,583,295.00	
		Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	49.72	51.64		52.77		36.52		36.52		
1.03.1.0 3.01.01 5.001	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan jalan yang disusun	7 Dokumen	8 Dokumen	1,413,500,000.00	7 Dokumen	1,555,000,000.00	3 Dokumen	212,625,000.00	25 Dokumen	3,181,125,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 5.003	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	6,669 km	6,00 km	6,327,232,000.00	3,00 km	8,349,270,000.00	0,680 km	533,050,000.00	16,349 Km	15,209,552,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 5.004	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	155,000,000.00	1 Dokumen	175,000,000.00	1 Dokumen	100,875,000.00	4 Dokumen	430,875,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 5.005	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	5 unit	14 unit	3,246,247,000.00	3 unit	3,600,000,000.00	4 unit	693,725,000.00	26 Unit	7,539,972,000.00	Kota Singka wang



1.03.1.0 3.01.01 5.007	Peningkatan jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	12,141 km	7,185 km	30,154,133,975.00	7,400 km	33,200,000,000.00	5,4 km	9,802,050,320.00	32,126 Km	73,156,184,295.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.01 5.010	Perencanaan peningkatan jalan	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	310,000,000.00	1 Dokumen	350,000,000.00	1 Dokumen	70,875,000.00	5 Dokumen	730,875,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.01 6	PROGRAM PEMBANGUNAN ALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik (%)	38.89	40.85	6,222,000,000.00	42.07	5,500,000,000.00	58.93	1,627,909,946.00	58.93	13,349,909,946.00	
1.03.1.0 3.01.01 6.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase kota yang dibangun	6.200 M'	4.920 M'	6,222,000,000.00	3.400 M'	5,500,000,000.00	722 M'	1,627,909,946.00	15.242 M'	13,349,909,946.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.01 7	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD BRONJONG	Persentase sungai/parit rawan longsor dalam kondisi baik (%)	44.55	46.09	1,860,300,000.00	50.32	2,000,000,000.00	85.05	1,082,923,130.00	85.05	4,943,223,130.00	
1.03.1.0 3.01.01 7.003	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Panjang tebing yang dibangun	1.005 M'	667 M'	1,860,300,000.00	750 M'	2,000,000,000.00	149 M'	1,082,923,130.00	2.571 M'	4,943,223,130.00	Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.01 8	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan yang dipelihara (%)	3.72	4	5,775,000,000.00	6	9,603,880,000.00	1.76	3,087,736,943.00	1.76	18,466,616,943.00	
		Persentase panjang jembatan yang dipelihara (%)	12	14		16				16		
		Persentase jembatan yang dipelihara (%)						6.97		6.97		
1.03.1.0 3.01.01 8.001	Perencanaan rehabilitasi/pemeli- araan jalan	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeli- haraan jalan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	155,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	70,875,000.00	4 Dokumen	425,875,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 8.003	Rehabilitasi/pemeli- haraan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	8,185 km	4,060 km	2,270,000,000.00	5,350 km	4,500,000,000.00	1,8 km	1,548,050,000.00	19,395 km	8,318,050,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 8.006	UPT : Rehabilitasi/pemeli- haraan rutin jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	55 ruas jalan	54 ruas jalan	3,075,000,000.00	62 ruas jalan	4,601,380,000.00	69 ruas jalan	1,415,209,118.00	240 Ruas	9,091,589,118.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 8.007	UPT : Rehabilitasi/pemeli- haraan rutin jembatan	Jumlah jembatan diperbaiki	15 unit	15 unit	275,000,000.00	19 unit	302,500,000.00	25 unit	53,602,825.00	74 Unit	631,102,825.00	Kota Singka wang



1.03.1.0 3.01.02 0	PROGRAM INSPEKSI JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan dan jembatan yang diinspeksi (%)	50	52	49,395,700.00	54	30,000,000.00	1.887	50,700,000.00	1.887	130,095,700.00	
1.03.1.0 3.01.02 0.001	Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah jalan yang diinspeksikan	237 Ruas Jalan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	237 ruas jalan	5,000,000.00	0	0	474 Ruas jalan	5,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.02 0.002	Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah jembatan yang diinspeksikan	105 unit	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	105 unit	5,000,000.00	0	0	110 Unit	5,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.02 0.004	Pengadaan aplikasi informasi kondisi jalan dan jembatan PU-Centre (PUCENT)	Jumlah Aplikasi pengaduan masyarakat / SMS Centre	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	1 paket aplikasi	28,055,700.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	1 Paket	28,055,700.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.02 0.005	Sosialisasi penggunaan aplikasi informasi kondisi jalan dan jembatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	80 orang	21,340,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	80 Orang	21,340,000.00	Kota Singka wang



1.03.1.0 3.01.02 0.006	Perencanaan Pengembangan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan jalan yang disusun	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	3 Dokumen	10,000,000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	21,340,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.02 0.007	Survey Kondisi Jalan dan LHR	Jumlah ruas jalan yang disurvey	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	20 Ruas Jalan	10,000,000.00	4 Ruas Jalan	50,700,000.00	24 Ruas Jalan	60,700,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.02 4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRRIGASI LAINNYA	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	36.02	40	43,025,600,000.00	45	27,201,570,000.00	49.23	1,442,403,775.00	49.23	71,669,573,775.00	
1.03.1.0 3.01.02 4.010	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi yang dipelihara	83 Ha	26 Ha	10,280,440,000.00	13 Ha	5,280,440,000.00	5 Ha	390,556,825.00	127 Ha	15,951,436,825.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.02 4.015	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Luas jaringan irigasi yang dioptimalisasi	21 Ha	133 Ha	1,340,100,000.00	133 Ha	1,340,100,000.00	9 Ha	250,993,000.00	296 Ha	2,931,193,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.02 4.018	Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi yang dikembangkan dan ditingkatkan	49 Ha	11 Ha	31,405,060,000.00	8 Ha	20,581,030,000.00	10 Ha	800,853,950.00	78 Ha	52,786,943,950.00	Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.02 5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	Persentase Intake dalam kondisi baik (%)	66.25	67.5	4,073,800,000.00	68.81	6,277,490,000.00	50	982,482,000.00	50	11,333,772,000.00	
		Persentase pipa transmisi dalam kondisi baik (%)	82	83		85		85		85		
1.03.1.0 3.01.02 5.001	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sumber air baku	6 Unit	2 Unit	2,891,800,000.00	2 Unit	4,180,980,000.00	1 Unit	678,675,000.00	9 Unit	7,751,455,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.02 5.002	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Jumlah intake yang di rehabilitasi	1 paket, 7 unit	21 unit	1,182,000,000.00	21 unit	2,096,510,000.00	2 unit	303,807,000.00	51 Unit	3,582,317,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.02 7	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga memiliki sanitasi baik (%)	45	48	3,491,478,000.00	49	3,666,050,000.00	92.11	1,273,655,664.00	92.11	8,431,183,664.00	
		Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	4.71	5.37		6.21				6.21		
		Persentase jaringan air minum yang berfungsi baik (%)	75	80		85		45.03		45.03		
1.03.1.0 3.01.02 7.002	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman yang dibangun	200 Unit	200 Unit	1,755,600,000.00	250 Unit	1,766,050,000.00	22 Unit	225,105,664.00	672 Unit	3,746,755,664.00	Kota Singka wang



1.03.1.0 3.01.02 7.006	Pengembangan distribusi air minum	Panjang pipa air minum yang terpasang	15.573 M'	6.760 M'	1,735,878,000.00	7.860 M'	1,900,000,000.00	4.020 M'	1,048,550,000.00	34.213 M'	4,684,428,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.02 8	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Persentase luas genangan (%)	4.2	5.8	1,086,979,000.00	6.2	1,141,330,000.00		707,447,300.00	6.2	2,935,756,300.00	
		Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik (%)						72.67		72.67		
1.03.1.0 3.01.02 8.006	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Panjang saluran yang dibangun	14.512 M'	1.500 M'	1,086,979,000.00	7.600 M'	1,141,330,000.00	6.113 M'	707,447,300.00	29.725 M'	2,935,756,300.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 1	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN PEMERINTAH	Persentase bangunan pemerintah yang memenuhi syarat (%)	75	76	19,338,200,000.00	77	19,505,110,000.00		15,445,532,234.0.00	77	54,288,842,234.00	
		Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik						69.09		69.09		
1.03.1.0 3.01.03 1.004	Pembangunan dan peningkatan gedung pemerintah	Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun dan ditingkatkan	17 Paket	24 unit	19,338,200,000.00	20 unit	19,505,110,000.00	7 unit	15,445,532,234.0.00	68 Unit	54,288,842,234.00	Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.03 2	PROGRAM REVITALISASI PENYEDIAAN AIR BERSIH	Persentase jaringan air minum yang berfungsi baik (%)	75	80	2,591,977,000.00	85	2,721,580,000.00		1,210,000,000.00	85	6,523,557,000.00	
		Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	4.71	5.37		6.21				38.44		
1.03.1.0 3.01.03 2.007	Pengadaan jaringan air bersih	Panjang pipa jaringan air bersih	14.113 M'	12.300 M'	2,591,977,000.00	5.122 M'	2,721,580,000.00	600 M'	1,210,000,000.00	36.926 M'	6,523,557,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEKERJAAN UMUM	Persentase peningkatan	100	100	1,200,000,000.00		0.00		0.00	100	1,200,000,000.00	
		pelayan publik badan PU (%)										
1.03.1.0 3.01.03 5.006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah sarana dan prasarana publik yang dibangun	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	6 unit	1,200,000,000.00	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	6 Unit	1,200,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun (%)	78	79	2,562,112,500.00	80	1,650,000,000.00	8.33	422,241,250.00	8.33	10,028,893,750.00	
1.03.1.0 3.01.03 7.002	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Jumlah dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	1 Dokumen	101,900,000.00	2 Dokumen	600,000,000.00	2 Dokumen	302,401,850.00	5 Dokumen	1,004,301,850.00	Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.03 7.003	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah paket media sosialisasi	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	0	0.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7.004	Penyusunan rencana tata ruang wilayah	Jumlah dokumen revisi rencana tata ruang, Ranperda dan KLHS RTRW	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	3 Dokumen	690,000,000	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	3 Dokumen	690,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7.007	Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Jumlah dokumen RTBL	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	0	0.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7.011	Review rencana tata ruang	Jumlah dokumen review rencana tata ruang	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	5 dokumen	522,112,500.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	5 Dokumen	522,112,500.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7.013	Survey dan Pemetaan (Penataan Garis Sempadan Pantai)	Jumlah patok pantai di kota singkawang	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	138 buah patok	200,950,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	138 Buah	200,950,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7.016	Fasilitasi persetujuan substansi RAPERDA tentang RTRW dan Penetapan PERDA RTRW Kota Singkawang	Jumlah dokumen persetujuan substansi dan PERDA RTRW	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	2 Dokumen	119,839,400.00	2 Dokumen	119,839,400.00	Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.03 7.018	Pembuatan Peta Topografi	Jumlah peta topografi	1 Peta topografi interval kontur 1 m seluas 20.000 Ha	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	0	0	0	0	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7.025	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen dan data digital pemetaan	5 Peta Kecamatan Indikatif, 10 Peta Kelurahan Indikatif (hardcopy dan softcopy)	2 Dokumen	1,278,000,000.00	2 dokumen dan data digital	360,000,000.00	0	0	4 Dokumen	1,638,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 7.026	Perencanaan Taman Kota	Jumlah dokumen perencanaan taman kota	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	2 Dokumen	459,150,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	2 Dokumen	459,150,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 8	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Rasio pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata ruang	1:1,37	1:2,4	1,038,250,000.00	1:3,27	1,659,020,000.00	1:1,27	75,468,875.00	1:1,27	2,772,738,875.00	



1.03.1.0 3.01.03 8.003	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	1 dokumen	175,000,000	0	0	1 Dokumen	175,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 8.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	1 dokumen	53,000,000.00	1 dokumen	300,920,000.00	0	0	2 Dokumen	353,920,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 8.011	Penyediaan peta dasar dan tematik	Jumlah peta dasar dan tematik lainnya	74 peta dasar dan tematik lainnya	1 dokumen	28,000,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	75 dokumen	28,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 8.013	Updating informasi tata ruang	Jumlah sarana informasi tata ruang	1 web	1 Unit	43,000,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	1 Unit	43,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 8.014	Pemanfaatan Taman Kota	Jumlah lokasi taman kota yang dimanfaatkan	3 taman kota	3 taman kota	516,750,000.00	2 taman kota	519,050,000.00	0	0	8 Taman	1,035,800,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 8.015	Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah taman yang dipelihara	26 lokasi	41 Lokasi	397,500,000.00	36 Lokasi	628,050,000.00	0	0.00	139 Lokasi	1,025,550,000.00	Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.03 8.016	Fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	12 Kegiatan	36,000,000.00	3 Kegiatan	19,033,850.00	15 Kegiatan	55,033,850.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 8.017	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi Geoportal	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	1 Sistem Informasi Geoportal	56,435,025.00	1 Sistem	56,435,025.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 9	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase ketaatan Rencana Tata Ruang(%)	90	90.22	529,450,000.00	90.34	582,400,000.00	99.62	285,009,525	99.62	1,396,859,525.00	
1.03.1.0 3.01.03 9.003	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah masyarakat yang berperan dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	52 Orang	78,000,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	0	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	52 Orang	78,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 9.004	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	0	12 Orang	58,000,000.00	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0	12 Orang	58,000,000.00	Kota Singkawang



1.03.1.0 3.01.03 9.007	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah media sosialisasi tata ruang	6 unit	3 Unit	207,100,000.00	4 Unit	220,000,000.00	4 Unit	166,962,800.00	17 Unit	594,062,800.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 9.009	Advise untuk mendukung IPPT	Jumlah dokumen Rekomendasi/Advise IPPT	120 Rekomendasi	200 Rekomendasi	38,000,000.00	150 Rekomendasi	149,000,000.00	100 Rekomendasi	14,131,625.00	570 Rekomendasi	201,131,625.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.03 9.023	Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kota Singkawang	Jumlah dokumen tipologi RTH Kota Singkawang	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	1 Dokumen	206,350,000.00	1 Dokumen	155,400,000.00	1 Dokumen	103,915,100.00	3 Dokumen	465,665,100.00	Kota Singkawang
1.03.1.0 3.01.02 0	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Persentase areal pemakaman yang	N.A.	1	1,205,000,000.00	0	0	0	0	1	1,205,000,000.00	
		dikelola (%)										
1.03.1.0 3.01.02 0.006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah areal pemakaman yang difasilitasi	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2017	10 lokasi	1,205,000,000.00	0	0	0	0	10 Lokasi	1,205,000,000.00	Kota Singkawang
TOTAL					138,486,399,175.00		131,647,950,000.00		42,554,494,331.00		318,083,383,506.00	



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021 – 2022
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

SKPD: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Sampai Tahun 2020	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				337,127,338,000.00		185,555,275,100.00		522,682,613,100.00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan Urusan Pemerintah Daerah (%)		100%	10,934,790,000.00	100%	11,891,071,100.00	100%	22,825,861,100.00	



1.03.01.202	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	12,000,000.00	100%	14,500,000.00	100%	26,500,000	
1.03.01.202.01	Penyusunan renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Renstra dan reanja Perangkat Daerah		Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	0	3 Dokumen	7,000,000.00	4 dokumen	7,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01.202.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	1 dokumen	12,000,000.00	1 dokumen	7,500,000.00	4 dokumen	19,500,000	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01.202	Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi Keuangan (%)	100%	100%	8,628,500,000.00	100%	9,535,000,000.00	100%	18,163,500,000.00	
1.03.01.202.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	8,600,000,000.00	100%	9,500,000,000.00	100%	18,100,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01.202.06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23 dokumen	7 dokumen	9,500,000.00	7 dokumen	13,000,000.00	37 dokumen	22,500,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.01. 202.09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang dibutuhkan	54 dokumen	1 dokumen	19,000,000.00	1 dokumen	22,000,000.00	56dokumen	41,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum (%)		100%	2,294,290,000.00	100%	2,341,571,100.00	100%	4,635,861,100.00	
1.03.01. 203.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%	325,090,000.00	100%	365,000,000.00	100%	690,090,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	100%	27,000,000.00	100%	35,000,000.00	100%	62,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	100%	253,500,000.00	100%	265,000,000.00	100%	518,500,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	100%	100%	65,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	135,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.01. 203.10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	98,700,000.00	100%	120,000,000.00	100%	218,700,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	149,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	299,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	25,000,000.00	100%	30,786,500.00	100%	55,786,500.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	264,500,000.00	100%	165,000,000.00	100%	429,500,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	7,500,000.00	100%	8,784,600.00	100%	16,284,600.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan	100%	100%	62,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	127,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang



1.03.01. 203.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	100%	100%	678,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	1,378,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.29	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	100%	15,000,000.00	100%	17,000,000.00	100%	32,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.31	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bahan bakar yang disediakan, Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan		6010 Liter, 20 Kali	134,000,000.00	6100 Liter, 22 Kali	150,000,000.00	12.110 Liter, 42 Liter	284,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.01. 203.39	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Cakupan Gedung Kantor yang direhabilitasi	100%	100%	190,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	390,000,000.00	Dinas PUPR Kota Singkawang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sungai/parit yang menggunakan turap/talud/bronjong		9,20	57,464,090,000.00	10,07	30,993,830,000.00	10,07	88,457,920,000.00	
		Persentase intake dalam kondisi baik		57.69		65.38		65.38		
		Persentase Daerah irigasi yang tertangani		10.06		17.24		17.24		



1.03.02. 201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu area Kabupaten / Kota	Panjang Sungai/parit yang menggunakan turap/talud/bronjong		10.572	49,882,420,000.00	11.572	22,653,993,000.00	9,829	72,536,413,000.00	
		Jumlah intake dalam kondisi baik		15		17		17.00		
1.03.02. 201.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	jumlah pembangunan sarana dan prasarana sumber air baku	12 unit	4 Unit	2,562,950,000.00	1 Unit	5,177,427,500.00	17 Unit	7,740,377,500.00	Kota Singka wang
1.03.02. 201.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	jumlah sumur yang dibangun		1 Unit	173,075,000.00			1 Unit	173,075,000.00	Kota Singka wang
1.03.02. 201.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Tebing yang di bangun	3192 M'	3300 M'	24,282,145,000.00	3691 M'	10,382,190,500.00	10.183 M'	19,664,335,500.00	Kota Singka wang
1.03.02. 201.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	luasan kolam retensi yang di bangun		1 Unit	820,000,000.00	1 Unit	2,000,000,000.00	2 Unit	2,820,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.02. 201.17	Pembangunan Break Water	Panjang Bangunan Break Water		550 M'	15,000,000,000.00	-	-	550 M'	15,000,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.02. 201.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Intake/Embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	70 unit	4 Unit	448,425,000.00	21 unit	1,133,325,000.00	95 unit	1,581,750,000.00	Kota Singka wang



1.03.02. 201.45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah danau yang direvitalisasi dan dipelihara		1 Unit	3,713,600,000.00	1 Unit	1,213,825,000.00	2 Unit	4,927,425,000.00	Kota Singkawang
1.03.02. 201.46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang saluran yang dibangun	38.252 M'	45.900M'	2,715,000,000.00	42.265 M'	2,500,000,000.00	126.417 M'	5,215,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.02. 201.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung/penampung air yang dipelihara		3 Unit	167,225,000.00	5 Unit	247,225,000.00	8 Unit	414,450,000.00	Kota Singkawang
1.03.02. 202	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi yang ditangani		105	7,581,670,000.00	180	8,339,837,000.00	180	15,921,507,000.00	
1.03.02. 202.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan irigasi yang dikembangkan dan ditingkatkan	89 Ha	49 Ha	3,180,165,000.00	56 Ha	5,432,107,000.00	194 Ha	8,612,272,000.00	Kota Singkawang
1.03.02. 202.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan irigasi yang dipelihara	140 Ha	40 Ha	3,446,715,000.00	49 Ha	1,749,865,000.00	229 Ha	5,196,580,000.00	Kota Singkawang
1.03.02. 202.23	Operasi dan Pemeliharaan	Luas jaringan irigasi yang dioptimalisasi	311 Ha	60 Ha	954,790,000.00	75 Ha	1,157,865,000.00	446 Ha	2,112,655,000.00	Kota Singkawang



	Jaringan Irigasi dan Rawa									
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jaringan air minum yang berfungsi baik		45.26	5,356,740,000.00	45.48	5,902,410,000.00	45.48	11,259,150,000.00	
1.03.03.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan air minum yang berfungsi baik		335188 M'	5,356,740,000.00	338539 M'	5,902,410,000.00	338539 M'	11,259,150,000.00	
1.03.03.201.05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Panjang pipa yang terpasang	75.119 M'	21.016 M'	5,356,740,000.00	22.000 M'	5,902,410,000.00	118.135 M'	11,259,150,000.00	Kota Singkawang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sistem pengelolaan sampah regional		30	300,000,000.00	60	150,000,000.00	60	450,000,000.00	



1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sampah Regional		2 Dokumen	300,000,000.00	2 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen	450,000,000.00	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dok	100,000,000.00	2 Dok	250,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dok	50,000,000.00	2 Dok	200,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga memiliki sanitasi baik		92.57	1,900,000,000.00	93.03	2,080,000,000.00	93.03	3,980,000,000.00	



1.03.05.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga bersanitasi baik		42347 Unit	1,900,000,000.00	42983 Unit	2,080,000,000.00	42983 Unit	3,980,000,000.00	
1.03.05.201.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman yang dibangun	900 Unit	62 Unit	1,900,000,000.00	70 Unit	2,080,000,000.00	1.032 Unit	3,980,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan genangan banjir		4.33	14,950,000,000.00	4.31	16,000,000,000.00	4.31	30,950,000,000.00	
1.03.06.201	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		120,125	14,950,000,000.00	122,825	16,000,000,000.00	122,825	30,950,000,000.00	
1.03.06.201.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Dan Lingkungan	Panjang Drainase yang dibangun	18.320 M'	17.485 M'	11,582,000,000.00	19.625 M'	13,000,000,000.00	55.790 M'	24,582,000,000.00	Kota Singkawang



1.03.06. 201.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Dan Lingkungan	Panjang Drainase yang di Rehabilitasi		2.110 M'	1,410,000,000.00	1.496 M'	1,000,000,000.00	3.606 M'	2,410,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.06. 201.09	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Drainase yang di Pelihara		47.617 M'	1,958,000,000.00	48.639 M'	2,000,000,000.00	96.256 M'	3,958,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik		70	9,550,000,000.00	72	10,600,000,000.00	72	20,150,000,000.00	
1.03.07. 201	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota	Panjang Jalan Permukiman dan Panjang Drainase Permukiman Dalam Kondisi Baik		6 Km dan 4 Km	9,550,000,000.00	7 Km dan 5 Km	10,600,000,000.000	13 Km dan 9 Km	20,150,000,000.00	
1.03.07. 201.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Panjang jalan dan Drainase Permukiman yg di bangun		5 km dan 3 km	8,000,000,000.00	5 km dan 3 km	8,000,000,000.00	10 Km dan 6 Km	16,000,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.07. 201.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Panjang jalan dan Drainase Permukiman yg di Pelihara		1 km dan 1 km	1,000,000,000.00	2 km dan 2 km	2,000,000,000.00	3 Km dan 3 Km	3,000,000,000.00	Kota Singka wang



1.03.07. 201.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen		5 dok	550,000,000.00	5 dok	600,000,000.00	10 dok	1,150,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan Dalam Kondisi Baik		70.91	41,305,000,000.00	72.73	30,555,000,000.00	72.73	71,860,000,000.00	
1.03.08. 201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		39 Unit	41,020,000,000.00	40 Unit	30,270,000,000.00	40 Unit	71,290,000,000.00	
		Jumlah Rekomendasi yang diberikan		365	285,000,000.00	365	285,000,000.00	730	570,000,000.00	



1.03.08. 201.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB, SLF, TABG dan Jumlah Aplikasi SIMBG		365 Rekomen dasi dan 1 Aplikasi	185,000,000.00	365 Rekomen dasi dan 1 Aplikasi	185,000,000.00	730 Rekomen dasi dan 1 Aplikasi	370,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.08. 201.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung daerah yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	81 Unit	31 Unit	41,020,000,000.00	40 Unit	30,270,000,000.00	152 Unit	71,290,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.08. 201.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen		2 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	50,000,000.00	4 Dokumen	100,000,000.00	Kota Singka wang



1.03.08. 201.10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	100,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang tertata		2.56	9,165,500,000.00	3.07	3,400,000,000.00	3.07	12,565,500,000.00	
1.03.09. 201	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan		4 Kegiatan	9,165,500,000.00	4 Kegiatan	3,400,000,000.00	8 Kegiatan	12,565,500,000.00	
1.03.09. 201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen		7 Dokumen	960,000,000.00	7 Dokumen	700,000,000.00	14 Dokumen	1,660,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.09. 201.02	Supervisi Penataan/Pemeliha ran Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen		4 Dokumen	450,000,000.00	4 Dokumen	450,000,000.00	8 Dokumen	900,000,000.00	Kota Singka wang



1.03.09. 201.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lokasi lingkungan yang ditata, jumlah peserta yang memahami perencanaan penataan bangunan		24 Unit, 200 orang	7,005,500,000.00	6 Unit, 200 orang	1,500,000,000.00	30 Unit, 400 orang	8,505,500,000.00	Kota Singka wang
1.03.09. 201.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara		1 Unit	375,000,000.00	1 Unit	375,000,000.00	2 Unit	750,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.09. 201.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring dan pengendalian		2 Dokumen	375,000,000.00	2 Dokumen	375,000,000.00	4 Dokumen	750,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik		34,97	182,382,210,000.00	27.16	70,240,230,000.00	27.16	252,622,440,000.00	
1.03.10. 02.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota	Panjang Jalan kota dalam Kondisi baik		154,774	182,382,210,000.00	120	70,240,230,000.00	120	252,622,440,000.00	
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik		47		51		51		
1.03.10. 201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah dokumen		-	-	1 dokumen	101,375,000.00	1 dokumen	101,375,000.00	Kota Singka wang



1.03.10. 201.02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan		2 Ha	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.10. 201.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen		2 Dokumen	302,625,000.00	6 Dokumen	202,750,000.00	8 Dokumen	505,375,000.00	Kota Singka wang
1.03.10. 201.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	17,669 Km	2,50 km	5,725,525,000.00	2 km	5,339,075,000.00	24,169 km	11,064,600,000.00	Kota Singka wang
1.03.10. 201.12	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	26 Unit	6 unit	3,176,650,000.00	8 unit	8,127,800,000.00	38 unit	11,304,450,000.00	Kota Singka wang
1.03.1.0 3.01.01 5.007	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	34,426 Km	60,50 km	162,182,645,000.00	16,00 km	43,048,620,000.00	110,926 km	205,231,265,000.00	Kota Singka wang
1.03.10. 201.09	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	22,095 km	5,00km	2,993,875,000.00	15 km	7,001,125,000.00	42,095 km	9,995,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.10. 201.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	240 Ruas	71 Ruas	4,324,640,000.00	73 Ruas	4,379,735,000.00	384 ruas jalan	8,704,375,000.00	Kota Singka wang
1.03.10. 201.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan diperbaiki	74 Unit	25 unit	250,000,000.00	26 unit	260,000,000.00	125 unit	510,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.10. 201.21	Penanggulangan bencana/tanggap darurat	Panjang jalan yang dipelihara dan jumlah jembatan yang dipelihara		Jalan 3 Km dan Jembatan 5 Unit	668,375,000.00	Jalan 6 Km dan Jembatan 5 Unit	1,018,125,000.00	Jalan 6 Km dan Jembatan 10 Unit	1,686,500,000.00	Kota Singka wang



1.03.10. 201.04	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Jumlah jalan yang diinspeksikan/disurvey	739 Ruas jalan	265 ruas jalan	757,875,000.00	265 ruas jalan	761,625,000.00	1269 ruas jalan	1,519,500,000.00	Kota Singka wang
		Jumlah jembatan yang diinspeksikan/disurvey	315 Unit	115 Unit		105 unit		535 unit		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase kelayakan perusahaan jasa konstruksi		50	1,295,000,000.00	70	1,245,000,000.00	70	2,540,000,000.00	
1.03.11. 201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi		200	645,000,000.00	200	645,000,000.00	400	1,290,000,000.00	
1.03.11. 201.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	2 Dokumen	150,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.11. 201.02	Penyiapan Intsruktur/Asesor/Pe nyelenggara Pelatihan	Jumlah Peserta		3 Peserta	300,000,000.00	3 Peserta	300,000,000.00	6 Peserta	600,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.11. 201.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Training		200 Peserta	200,000,000.00	200 Peserta	200,000,000.00	400 Peserta	400,000,000.00	Kota Singka wang



1.03.11. 201.06	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat yang diterbitkan		200 Lembar	70,000,000.00	200 Lembar	70,000,000.00	400 Lembar	140,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.11. 202	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa konstruksi yang terdata di SIPJAKI		165	150,000,000.00	165	100,000,000.00	330	250,000,000.00	
1.03.11. 202.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.11. 202.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Peserta		2 Peserta	50,000,000.00	2 Peserta	50,000,000.00	4 Peserta	100,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.11. 203	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan		165	150,000,000.00	165	150,000,000.00	330	300,000,000.00	
1.03.11. 203.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	100,000,000.00	Kota Singka wang



1.03.11.203.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.11.204	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	350,000,000.00	1 Dokumen	350,000,000.00	2 Dokumen	700,000,000.00	
1.03.11.204.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50,000,000.00	-	0	1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.11.204.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta		100 Peserta	300,000,000.00	100 Peserta	300,000,000.00	200 Peserta	600,000,000.00	Kota Singkawang



1.03.11. 204.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen		-	0	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan		16.67	2,524,008,000.00	25	2,497,734,000.00	25	5,021,742,000.00	
		Rasio pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang		1:1,22		1:1,20		1:1,20		
1.03.12. 201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah penetapan RTRW dan RDTR Kota		2	1,280,630,000.00	2	900,000,000.00	4	2,180,630,000.00	
1.03.12. 201.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000.00			10 Dokumen	400,000,000.00	Kota Singkawang



1.03.12. 201.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	600,000,000.00	2 Dokumen	600,000,000.00	12 Dokumen	1,200,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.12. 201.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi		100 Orang	280,630,000.00	50 Orang	100,000,000.00	150 Orang	380,630,000.00	Kota Singka wang
1.03.12. 201.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200,000,000.00	3 Dokumen	200,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.12. 202	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi		2	578,000,000.00	2	778,000,000.00	4	1,356,000,000.00	
1.03.12. 201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000.00	2 Dokumen	700,000,000.00	8 Dokumen	1,200,000,000.00	Kota Singka wang
1.03.12. 202.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah masyarakat yang ikut berperan	64 Orang	52 Orang	78,000,000.00	52 Orang	78,000,000.00	168 Orang	156,000,000.00	Kota Singka wang



1.03.12.203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi, promosi rapat koordinasi		4	458,000,000.00	4	458,000,000.00	4	916,000,000.00	
1.03.12.203.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	100,000,000.00	14 Dokumen	200,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.12.203.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sarana informasi tata ruang	14 Unit	5 Unit	358,000,000.00	5 Unit	358,000,000.00	24 Unit	716,000,000.00	Kota Singkawang
1.03.12.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat TKPRD, rapat Koordinasi		4	207,378,000.00	4.00	361,734,000.00	8	569,112,000.00	
1.03.12.204.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	100,000,000.00	1 Kegiatan	100,000,000.00	Kota Singkawang



1.03.12. 204.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen	503 Dokumen	151 Dokumen	163,818,000.00	151 Dokumen	163,818,000.00	805 Dokumen	327,636,000.00	Kota Singkawang
1.03.12. 204.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan	24 Kegiatan	12 Kegiatan	43,560,000.00	15 Kegiatan	97,916,000.00	51 Kegiatan	141,476,000.00	Kota Singkawang
TOTAL					337,127,338,000.00		185,555,275,100.00		522,682,613,100.00	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kota Singkawang yang tertuang dalam RPJMD 2018 - 2022. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, Identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang 2018 - 2022 melalui program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dapat diukur melalui indikator dan target kinerja DPUPR. Indikator kinerja DPUPR yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Indikator KinerjaPerangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran DPUPRKota Singkawang	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TargetCapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan RTRW	90	100	100	100	100	100	100
2.	Rasio RTH	0,09	0,10	0,20	42,49			42,49
3.	Persentase rencana tata ruang yang disusun	78	79	80	8,33	16,67	25	25
4.	Rasio pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	1:1,37	1:2,4	1:3,27	1:1,27	1:1,22	1:1,20	1:1,20
5.	Persentase ketaatan rencana tata ruang	90	90,22	90,34	99,62			99,62



6.	Persentase areal pemakaman yang dikelola	N.A	1%					1%
7.	Persentase jalan mantap (%)	50,75	53	55,3	53,79	55,93	58,29	58,29
8.	Persentase jalan yang dibangun dan ditingkatkan (%)	8,5	9	9,5	1,37			1.37
9.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	49,72	51,64	52,77	36,52			36,52
10.	Persentase jalan yang dipelihara	3,72	4	6	1,76			1,76
11.	Persentase panjang jembatan yang dipelihara	12	14	16				16
12.	Persentase jembatan yang dipelihara				6,97			6,97
13.	Persentase jalan dan jembatan yang diinpeksikan	50	52	54	1,887			1,887
14.	Persentase jalan dalam kondisi baik					24,80	27,16	27,16
15.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	42	50	55	24,42	24,54	24,67	24,67
16.	Persentase Intake dalam kondisi baik	66,25	67,50	68,81	50	57,69	65,38	65,38
17.	Persentase pipa transmisi air bersih dalam kondisi baik	82	83	85				85
18.	Persentase masyarakat pengguna air bersih				38,44	38,63	38,83	38,83
19.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih	4,71	5,37	6,21	38,44			38,44
20.	Persentase jaringan air minum yang berfungsi baik	75	80	85	45,03	45,26	45,48	45,48
21.	Persentase rumah tangga memiliki sanitasi baik	45	48	49	92,11	92,57	93,03	93,03
22.	Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah	86,67	88,33	90	91,67	93,33	95	95
23.	Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi syarat	75	76	77	80	81,82	83,64	83,64



24.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	36,02	40	45	49,23			49,23
25.	Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik					25,14	30,39	30,39
26.	Persentase sungai/parit yang menggunakan turap/talud/bronjong					7,68	8,55	8,55
27.	Persentase Daerah Irigasi yang tertangani					10,06	17,24	17,24
28.	Luas kawasan genangan banjir				2190 Ha	2180 Ha	2170 Ha	2170 Ha
29.	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	38,89	40,85	42,07	61,13			61,13
30.	Persentase sungai/parit rawan longsor dalam kondisi baik	44,5	46,09	50,32	85,05			85,05
31.	Persentase Penanganan Persampahan Regional					30	60	60
32.	Persentase Penyediaan Sistem Pengolahan Persampahan Regional					30	60	60
33.	Persentase permukiman yang tertata					73,56	75,56	75,56
34.	Persentase kawasan yang tertata					2,56	3,07	3,07
35.	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik					70	72	72
36.	Persentase Kelayakan Perusahaan Jasa Konstruksi					50	70	70
37.	Persentase luas genangan	4,2	5,8	6,2				6,2
38.	Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik				72,67			72,67
39.	Persentase luas kawasan genangan banjir					4,33	4,31	4,31



BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang dapat dipedomani oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka pencapaian Visi, Misi Pembangunan Kota Singkawang serta tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta kecenderungan perubahan dimasa akan datang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik tingkat lokal, regional nasional dan global yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang tengah terjadi.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2022 ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan program dan kegiatan yang strategis dalam jangka pendek dan menengah, sehingga dengan demikian dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kota Singkawang,



Ir. H. ASYIR A, BAKAR, MT
NIP. 19631010 199003 1 018

